



**RENCANA INDUK KELITBANGAN
KABUPATEN BULELENG
2020 – 2025**

**KERJA SAMA
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS PANJI SAKTI SINGARAJA
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmatNya sehingga penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) Kabupaten Buleleng tahun 2020 – 2025 dapat diselesaikan sesuai jadwal dan rencana yang telah ditetapkan.

RINDUK ini disusun sebagai perencanaan kerja kelitbangan periode 5 (lima) tahunan yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program penelitian, pengembangan dan inovasi daerah, yang direalisasikan dalam rencana kerja tahunan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Program Kelitbangan diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, melalui hasil-hasil kelitbangan yang dapat dipergunakan dalam upaya meningkatkan kualitas keputusan dan kebijakan publik di daerah.

RINDUK ini disusun atas kerjasama Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dan para pemangku kepentingan, dalam memberi kontribusi pada keseluruhan isi dari RINDUK. Besar harapan kami agar RINDUK Kabupaten Buleleng tahun 2020 – 2025 dapat direalisasikan dalam program kerja tahunan, baik yang direalisasikan langsung oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, maupun oleh OPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Perencanaan dan penyusunan RINDUK ini, telah melibatkan seluruh sumberdaya yang ada dari Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, maupun OPD, serta pemangku kepentingan, yang dilibatkan oleh OPD, dan tim ahli yang ditunjuk. Dengan demikian hasil perencanaan ini merupakan hasil kerja bersama, sehingga dalam merealisasikan RINDUK ini diperlukan komitmen dari semua pihak, dan upaya penyempurnaan-penyempurnaan masih diperlukan, dalam proses implementasinya, guna memperoleh hasil yang maksimal, efektif dan efisien..

Singaraja, Nopember 2020

Bupati Buleleng,

Putu Agus Suradnyana

DAFTAR ISI

Judul	Halaman
Halaman sampul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Tujuan dan Sasaran	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM KELITBANGAN	
2.1. Gambaran Umum Wilayah	7
2.1.1. Aspek Geografi dan Administrasi	7
2.1.2. Aspek Demografi	8
2.1.3. Aspek Ekonomi	9
2.1.4. Aspek Kesejahteraan	16
2.1.5. Aspek Ketenagakerjaan	19
2.2. Kondisi Sumberdaya Kelitbangan	20
2.2.1. Kelembagaan	20
2.2.2. Sumber Daya Manusia Kelitbangan	22
2.2.3. Pendanaan Kelitbangan	22
2.2.4. Kerjasama Kelitbangan	22
2.3. Potensi dan Permasalahan	23
2.4. Peluang dan Tantangan	24
BAB III ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN	
3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	25
3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Daerah	25
3.1.2. Visi dan Misi	26
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah	29
3.2.1. Arah Kebijakan	30
3.2.2. Strategi	34
3.3. Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah	36
3.3.1. Program Prioritas Bidang Tata Kelomerintahan dan Pelayanan Publik	37
3.3.2. Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan.....	37
3.3.3. Program Prioritas Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah	37

3.3.4. Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek.....	37
BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN	
4.1. Kelembagaan	71
4.1.1. Koordinasi Pelaksanaan	72
4.1.2. Keterlibatan Institusi Kelitbangan	72
4.1.3. Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan	73
4.2. Evaluasi Pelaksanaan	74
BAB V PENUTUP	90
Daftar Pustaka	91

DAFTAR TABEL

Judul Tabel	halaman
1.1. Langkah-langkah, Rangkaian Aktivitas dan Instrument/Mekanisme Untuk Manajemen Strategi.....	2
2.1. Luas Daerah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Buleleng, Tahun 2019.....	7
2.2. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Persentase Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Persentase Laju Pertumbuhan Pertahun 2018-2019 menurut Kecamatan di Kabupaten Buleleng.....	8
2.3. Proyeksi Penduduk Kabupaten Buleleng Menurut Umur menurut hasil sensus Tahun 2000 – 2010.....	9
2.4. PDRB Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2015-2019 (Juta Rupiah).....	10
2.5. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2015-2019 (Persen).....	11
2.6. Laju Implisit PDRB Kabupaten Buleleng Menurut Lapangan Usaha.....	14
2.7. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Hurup Menurut Umur di Kabupaten Buleleng 2018-2019.....	17
2.8. Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas di Kabupaten Buleleng Menurut Pendidikan Yang Tertinggi yang Ditamatkan, 2015-2019.....	17
2.9. Angka Harapan Hidup Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali, 2015-2019.....	18
2.10. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buleleng, 2019.....	19
2.11. Angkatan Kerja yang Bekerja di Kabupaten Buleleng Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2015 – 2018.....	20
3.1. Identifikasi Isu Strategis RPJP Kabupaten Buleleng 2005-2025.....	26
3.2. Pokok-Pokok Visi dan Penjelasan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng (RPJP) 2005-2025.....	28
3.3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	30
3.4. Matriks Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, Arah Kebijakan dan Strategi Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2025.....	34
3.5. Sinergitas Agenda Strategis, Dan Program Prioritas Kelitbangan Kabupaten Buleleng 2020-2025.....	38
3.6. Indikasi Program Prioritas Kelitbangan dan Tahun Pelaksanaan.....	40
3.7. Indikasi Program Prioritas Kelibangan Kabupaten Buleleng 2020-2025.....	43
4.1. Indikator Kunci Kinerja Pelaksanaan Kelitbangan.....	74
4.2. Format Pelaporan Realisasi Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Buleleng 2020 – 2025.....	76

DAFTAR GAMBAR

Judul Gambar	halaman
2.1. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali.....	13
2.2. Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Buleleng Atas Dasar Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Kontan 2010 (Juta Rupiah) Periode 2015-2019.....	15
2.3. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buleleng.....	16
2.4. Grafik Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali	19
2.5. Struktur Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.....	21
4.1. Kelembagaan Kelitbangan Kabupaten Buleleng	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah yang didasari pada kebutuhan riil daerah serta tata kelola yang baik dari potensi daerah, dituangkan dalam bentuk kebijakan pemerintah daerah. Untuk menghasilkan kebijakan daerah yang berkualitas, menurut amanat UU No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah bahwa kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah daerah harus dapat merumuskan kebijakan yang bersifat inovasi dan didukung oleh kemampuan dalam menguasai ilmu dan teknologi.

Menurut pasal 387 UU No. 23 Tahun 2014 dalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintahan daerah mengacu pada prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak ada konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Prinsip-prinsip di atas dapat direalisasi dengan baik, apabila pada penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah lainnya, implementasi dan evaluasi program, dilakukan dengan didahului proses kelitbangan. Masalah menyusun dan mengimplementasikan program pembangunan daerah sebagai sebuah kebijakan bukanlah sebagai sesuatu yang mudah dilakukan, sebab :

- 1) Adanya saling ketergantungan berbagai masalah kebijakan serta kadang kondisi yang dapat saling berpengaruh dengan masalah-masalah kebijakan pada bidang lain.
- 2) Subyektifitas bisa terjadi pada masalah kebijakan diperlukan upaya untuk mengklarifikasi, menjelaskan, serta mengevaluasi secara selektifitas diperlukan untuk menghadapi kondisi eksternal.
- 3) Sifat buatan dari masalah sebab penyelesaian berbagai masalah kebijakan dimungkinkan dilakukan jika ada penilaian mengenai keinginan untuk mengubah berbagai situasi masalah.
- 4) Dinamika masalah kebijakan berkaitan dengan berbagai solusi masalah dimungkinkan muncul, yang dipengaruhi oleh kemampuan mendefinisikan berbagai masalah tersebut (Dunn, 1998).

Oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah manajemen strategis untuk dapat merumuskan dan menyelesaikan masalah kebijakan, yang hanya dapat dilaksanakan apabila dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan didahului dengan proses kelitbangan. Berikut manajemen strategi yang ditawarkan oleh Brinkerhoff & Crosby, dalam menyelesaikan masalah kebijakan.

Tabel 1.1. Langkah-langkah, Rangkaian Aktivitas dan Instrument / Mekanisme Untuk Manajemen Strategi

Manajemen Strategi/ Langkah-langkah	Manajemen Strategi/ Rangkaian Kegiatan	Manajemen Strategi/ Instrumen/mechanisme
Membangun kesepakatan dan menyusun tujuan	1. Kesepakatan atas dan inisiatif proses manajemen strategi 2. Identifikasi dan klarifikasi rangkaian misi, tujuan dan strategi terbaru	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis kesenjangan • Resolusi konflik • Tindakan organisasi • Uji coba • Workshop
Penilaian internal dan eksternal (SWOT)	3. Penilaian kekuatan dan kelemahan internal organisasi 4. Penilaian terhadap tantangan dan peluang lingkungan eksternal 5. Identifikasi para konstituen, stakeholder penentu dan harapan mereka	<ul style="list-style-type: none"> • Chek list kapasitas institusi • Pemetaan politik • Penilaian resiko politik • Analisis kajian kekuatan • Analisis stakeholder • Workshop
Opsi-opsi dan strategi	6. Identifikasi berbagai isu strategis yang dihadapi implementasi 7. Seleksi desain/analisis opsi strategi dan desain perencanaan tindakan	<ul style="list-style-type: none"> • Workshop <i>problem solving</i> • Analisis skenario • Perencanaan partisipatif • Resolusi konflik • Negosiasi, loby
Implementasi dan monitoring	8. Pelaksanaan strategi dan rencana aksi 9. Monitoring dan mereview kinerja strategi dan rencana aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi • Perbandingan • Indikator-indikator kinerja • Review strategi periodik

Sumber : Brinkerhoff & Crosby (2002)

Langkah-langkah manajemen strategis di atas sepenuhnya melibatkan kegiatan kelitbangan, sebagai langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan. Dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 219 menyatakan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) melaksanakan fungsi penunjang urusan daerah. Permendagri 17 tahun 2016, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Badan penelitian, pengembangan dan Inovasi Daerah berperan menghasilkan berbagai *proxy*, model, dan pilihan kebijakan yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan di daerah. Disamping itu penyelenggaraan inovasi daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi (Aulawi, 2020).

Kelitbangan kabupaten/kota melaksanakan fungsi penunjang pemerintah daerah melaksanakan fungsi antara lain :

1. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. Melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;

3. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati/walikota dan perangkat daerah di kabupaten/kota;
4. Mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

Selanjutnya berdasarkan amanat pasal 9 Permendagri No. 17 tahun 2016 menyebutkan bahwa Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun Rencana Kerja Kelitbangan. Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud terdiri dari: a) Rencana Induk Kelitbangan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan b) Rencana Kerja Tahunan. Penyusunan Rencana Kerja Kelitbangan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain: a.kebijakan dan program terkait; b.metode; c.waktu; d.lokasi; e.kelembagaan; f.sumberdaya manusia aparatur; g.sarana prasarana; h.fasilitas pendukung; dan i.pembiayaan.

Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Program kelitbangan berbasis pada inovasi daerah, dalam menyikapi berbagai persoalan tata kelola pemerintahan, potensi daerah dan layanan publik. Perlu dipahami berbagai kendala dan keterbatasan yang dimiliki oleh lembaga kelitbangan daerah, untuk mencapai hasil yang maksimal lembaga kelitbangan daerah perlu melaksanakan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RINDUK.

Disamping itu hasil dari kelitbangan adalah dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan, dimana dalam pelaksanaan terdapat variabel-variabel kritis yang dapat menentukan berhasil tidaknya implementasi kebijakan dari berbagai isu kebijakan, jenis dan tipe kebijakan, sistem politik, dan berbagai tingkatan pembangunan ekonomi yang disebut sebagai 5 C oleh Najam (1995) yaitu *Contents, Context, Commitment, Capacity and Client and Coalition*:

- (1) *Content*; menyangkut isi dari kebijakan itu sendiri, apa yang disiapkan untuk dikerjakan, bagaimana memproblematisasi sebuah isu (hubungan teori); bagaimana memecahkan problem (menyangkut metode);
- (2) *Context* meliputi menyusun *standard operating procedures* (SOP) yang harus dilalui dengan berbagai keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki dalam proses implementasi;
- (3) *Commitment*; dipercaya untuk membawa implementasi ke arah berbagai tingkatan tujuan, *causal theory*, dan metode-metode yang digunakan;
- (4) *Capacity*; meliputi kemampuan administratif dari para implementor dalam menghasilkan perubahan-perubahan yang diharapkan;
- (5) *Clients and coalition*; dukungan dan koalisi dari berbagai pemangku kepentingan, kepentingannya atau memperlakukan hasil kelitbangan dan strategi dari para pelaksana dapat memperkuat atau menghambat implementasi.

Untuk mempercepat memperoleh hasil dan kemanfaatan kelitbangan, maka upaya untuk mendorong kolaborasi dan proses kerjasama sangat diperlukan, dengan berbasis pada konsep *governance*

atau *good governance* (tata kelola yang baik). Petter dan Pierre (1998) menyatakan empat elemen dasar karakteristik dari diskusi *governance*.

1. Dominasi jaringan, *governance* didominasi melalui sebuah kesatuan koleksi kepemilikan pengaruh berbagai aktor terhadap apa dan bagaimana *public good* dan *service* diselenggarakan.
2. Pengurangan kekuatan kontrol negara, walaupun pemerintah tidak lagi memperluas penyelenggaraan pengawasan terpusat pada kebijakan publik, kekuasaan negara sekarang terletak pada kemampuan negosiasi dan bargaining dengan aktor-aktor dalam jaringan kebijakan.
3. Adanya perpaduan antar sumber daya publik dan privat, para aktor publik dan privat memanfaatkan satu dengan yang lainnya untuk memperoleh sumber daya yang tidak dapat diperoleh secara mandiri.
4. Dapat menggunakan multi instrumen, maksudnya dalam meningkatkan keikhlasan untuk mengembangkan dan mempergunakan metode tertentu dalam membuat dan melaksanakan program, yang telah disepakati secara bersama-sama (Frederickson & Smith, 2003).

Dengan demikian kegiatan kelitbangan selain sebagai upaya meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan, juga dimaknai sebagai upaya meningkatkan sinergi antar pihak pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, dan segenap pemangku kepentingan terkait dalam pendayagunaan Iptek dan inovasi dalam pembangunan daerah. Untuk mengoptimalkan pembangunan daerah, pemerintah daerah mesti mencari daya pengungkit yang berujung pada penentuan skala prioritas pembangunan. Para pelaksana melepaskan diri dari budaya birokratis yang kaku, mengarahkan perubahan kultural menuju *corporate culture* yang berlandaskan semangat kewirausahaan, menekankan anggaran berbasis kinerja dan efisiensi keuangan, transparansi dan akuntabilitas.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.18 Tahun 2002, Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Ketentuan Umum dan Lampiran tentang Penyusunan Naskah Akademik);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
7. Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050.05 – 474 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis (Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1447, 2019);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 3);

1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) adalah memberikan masukan dalam penyusunan dokumen/perubahan Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga dalam dokumen perencanaan daerah dapat mengakomodir kebutuhan program kelitbangan dalam lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Buleleng.

Sasaran Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) ini adalah memberikan arah pelaksanaan program/kegiatan kelitbangan untuk menunjang pencapaian visi dan misi serta program prioritas pembangunan tahun 2020-2025 di Kabupaten Buleleng.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Sasaran
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

- 2.1. Gambaran Umum Wilayah
- 2.2. Kondisi Sumberdaya Kelitbangan

- 2.2.1. Kelembagaan
- 2.2.2. Sumber Daya Manusia Kelitbangan
- 2.2.3. Pendanaan Kelitbangan
- 2.2.4. Kerjasama Kelitbangan

BAB III ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

- 3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
 - 3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang
Pembangunan Daerah
 - 3.1.2. Visi dan Misi
- 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah
 - 3.2.1. Arah Kebijakan
 - 3.2.2. Strategi
- 3.3. Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah
 - 3.3.1. Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 3.3.2. Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan
 - 3.3.3. Program Prioritas Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah
 - 3.3.4. Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN

- 4.1. Kelembagaan
 - 4.1.1. Koordinasi Pelaksanaan
 - 4.1.2. Keterlibatan Institusi Kelitbangan
 - 4.1.3. Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan
- 4.2. Evaluasi Pelaksanaan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

2.1. Gambaran Umum Wilayah

Gambaran umum wilayah Kabupaten Buleleng disajikan terkait dengan aspek geografi, administrasi, demografi, aspek ekonomi, sosial budaya dan kesejahteraan sosial.

2.1.1. Aspek Geografi dan Administrasi

Kabupaten Buleleng merupakan bagian dari Provinsi Bali yang memiliki luas wilayah mencapai 1665,88 Km² atau 23, 61 % dari luas wilayah Provinsi Bali yang memiliki luas 5780, 06 Km². Kabupaten Buleleng berada di bagian utara Pulau Bali, dengan letak pada posisi 8⁰3'40" – 8⁰23'00" lintang selatan dan 114⁰25'55" – 115⁰ 27'28" bujur timur. Kabupaten Buleleng secara administrasi berbatasan dengan Kabupaten Jembrana di bagian barat, laut Jawa/Bali di bagian utara, Kabupaten Karangasem di bagian timur dan 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Bangli ada di sebelah selatan Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng dengan wilayah yang memanjang dari barat ke timur, memiliki luas pantai sepanjang 157, 05 km, dan hampir semua kecamatan memiliki pantai kecuali Kecamatan Sukasada dan Busungbiu.

Wilayah Kabupaten Buleleng, apabila dilihat dari distribusi luas wilayah perkecamatan dapat dijelaskan, bahwa Gerokgak merupakan terluas mencapai 26 % dari luas Kabupaten Buleleng atau 356,57 km², disusul kemudian Kecamatan Busungbiu 14 % atau 196,62 km², Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Banjar masing-masing 13 % atau 172, 60 km² untuk Kecamatan Sukasada dan 172, 93 km² untuk Kecamatan Banjar, 9 % atau 118,24 km² untuk Kecamatan Kubutambahan, 7 % atau 92,52 km² Kecamatan Sawan, 7 % atau 97,68 km² untuk luas Kecamatan Tejakula dan kecamatan memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Buleleng yaitu mencapai 3 % dari seluruh wilayah Kabupaten Buleleng atau 46,94 km². Untuk luas wilayah menurut kecamatan tersaji pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1. Luas Daerah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Buleleng, Tahun 2019

Kecamatan	Ibu Kota	Luas Total Area (km ²)
Gerokgak	Gerokgak	356,57
Seririt	Seririt	111,78
Busungbiu	Busungbiu	196,62
Banjar	Banjar	172,6
Sukasada	Sukasada	172,93
Buleleng	Buleleng	46,94
Sawan	Sawan	92,52
Kubutambahan	Kubutambahan	118,24
Tejakula	Tejakula	97,68
Kabupaten Buleleng	Singaraja	1365,88

Sumber : Kabupaten Buleleng dalam Angka tahun 2020

2.1.2. Aspek Demografi

Penduduk merupakan modal yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkualitas tentunya yang dibutuhkan adalah penduduk yang berkualitas, sebab dengan penduduk yang berkualitas dapat diharapkan akan mampu menggali dan mengelola potensi daerah secara maksimal. Berdasarkan proyeksi kependudukan Kabupaten Buleleng memiliki jumlah penduduk mencapai 660,600 jiwa dari luas wilayah mencapai 1.365,88 km² dengan demikian kepadatan penduduk Kabupaten Buleleng mencapai 594 jiwa/km². Wilayah kecamatan yang memiliki penduduk paling padat adalah Kecamatan Buleleng, dengan jumlah penduduk mencapai 138,640 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya mencapai 2.954 jiwa/km², sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Busungbiu dengan jumlah penduduk mencapai 41.110 jiwa/km² dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 209 jiwa/km². Kemudian dijelaskan pula laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Buleleng mencapai 0,52 %, dengan pertumbuhan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Gerokgak mencapai 0,75%. Tingkat kepadatan penduduk perkecamatan dapat disajikan pada tabel 2.2.

Tabel. 2.2. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Persentase jumlah penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018-2019 menurut Kecamatan di Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Prosentase Peduduk	Jumlah (ribu jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Prosentase Pertumbuhan
1	Gerokgak	356,57	12,89	85.14	239	0,75
2	Seririt	111,78	11,09	73.23	655	0,45
3	Busungbiu	196,62	6,22	41.11	209	0,39
4	Banjar	172,60	11,06	73.06	423	0,52
5	Sukasada	172,93	11,85	78.28	453	0,75
6	Buleleng	46,94	20,99	138.64	2954	0,62
7	Sawan	92,52	9,22	60.93	659	0,38
8	Kubutambahan	118,24	8,47	55.98	473	0,38
9	Tejakula	97,68	8,21	54.23	555	0,04
Jumlah		1.365,88	100	660.60	484	0,52

Sumber : Kabupaten Buleleng Dalam Angka Tahun 2020

Komposisi penduduk Kabupaten Buleleng menurut jenis kelamin pada sensus penduduk mengalami peningkatan mencapai 558.181 jiwa pada tahun 2000 menjadi 624.125 jiwa pada tahun 2010. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat dijelaskan penduduk laki-laki mencapai 311.394 jiwa atau sekitar 49,89%, sedangkan penduduk perempuan mencapai 312.731 jiwa atau 50,11% pada hasil sensus 2010. Sedangkan jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat dijelaskan bahwa kelompok umur 5-10 tahun dengan jumlah tertinggi, yaitu: 60.134 jiwa, sedangkan jumlah penduduk kelompok umur paling sedikit adalah 70-74 tahun, yaitu mencapai 12.746 jiwa pada tabel 2.3. di bawah ini.

Tabel 2.3. Proyeksi Penduduk Kabupaten Buleleng Menurut Umur menurut hasil sensus Tahun 2000-2010

Kelompok Umur	2000			2010		
	Laki	Perempuan	Jumlah	Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	26.917	25.856	52.773	28.644	26.825	55.469
5-9	27.561	25.869	53.430	30.878	29.256	60.134
10-14	27.892	26.014	53.906	30.347	28.336	58.683
15-19	29.721	27.502	57.223	26.255	23.229	49.484
20-24	23.855	24.224	48.079	21.357	21.430	42.787
25-29	24.332	25.425	49.757	23.081	23.293	46.374
30-34	21.300	22.744	44.044	23.847	23.780	47.627
35-39	20.772	22.085	42.857	24.351	24.155	48.506
40-44	17.992	18.796	36.788	22.247	23.405	45.652
45-49	14.863	14.717	29.580	19.824	20.952	40.776
50-54	11.105	12.148	23.253	17.209	18.543	35.752
55-59	9.588	10.003	19.591	13.399	13.358	26.757
60-64	7.961	8.521	16.482	9.545	11.351	20.896
65-69	5.548	6.660	12.208	8.334	9.328	17.662
70-74	4.300	4.925	9.225	5.803	6.943	12.746
75 +	4.060	4.887	8.947	6.273	8.547	14.820
Jumlah	277.790	280.391	558.181	311.394	312.731	624.125

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng 2019

2.1.3. Aspek Ekonomi

A. Pertumbuhan *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*

Kondisi perekonomian Kabupaten Buleleng bertumbuh dan mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini pertumbuhan *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)* positif. PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp. 18.818.624.360.000,- pada tahun 2016 meningkat menjadi 23.437.492.470.000,- pada tahun 2019.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi paling tinggi pada PDRB atas dasar harga konstan periode 2016-2019, yaitu Rp. 4.048.606.080.000,- pada tahun 2016 dan Rp. 4.719.685.930.000,- pada tahun 2019. Sedangkan sektor yang memberi kontribusi paling sedikit pada PDRB adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas mencapai Rp. 25.448.740.000,- tahun 2016, mengalami peningkatan menjadi Rp. 32.308.510.000,- pada tahun 2019. Data perkembangan PDRB Kabupaten Buleleng atas dasar harga konstan disajikan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. PDRB Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2016 – 2019 (Juta Rupiah)

Sektor PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.048.606,08	4.177.191,88	4.292.341,84	4.451.112,09	4.719.685,93
Pertambangan dan Penggalan	226.095,58	246.726,70	231.750,39	218.816,57	207.464,34
Industri Pengolahan	1.124.580,82	1.163.647,66	1.197.573,97	1.266.264,20	1.326.639,40
Pengadaan Listrik dan Gas	25.448,74	27.441,48	28.534,65	30.128,09	32.308,51
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	29.512,60	31.110,53	32.757,61	33.430,94	34.338,18
Konstruksi	1.594.865,95	1.700.914,83	1.793.001,32	1.931.937,80	2.083.706,63
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.227.121,31	2.313.512,69	2.476.119,57	2.687.888,51	2.885.892,82
Transportasi dan Pergudangan	248.988	261.056,48	270.302,82	286.762,34	303.764,44
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.846.031,99	3.109.259,35	3.415.268,15	3.664.925,36	3.846.296,42
Informasi dan Komunikasi	1.217.479,65	1.336.330,07	1.459.962,26	1.560.857,32	1.647.759,31
Jasa Keuangan dan Asuransi	825.818,84	879.883,25	904.907,54	923.011,52	991.568,98
Real Estat	1.013.232,39	1.038.062,25	1.094.037,43	1.137.874,92	1.184.537,27
Jasa Perusahaan	126.166,48	134.294,08	142.581,74	150.891,35	159.162,77
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.184.975,21	1.241.940,27	1.206.696,53	1.243.141,37	1.286.843,40
Jasa Pendidikan	1.337.772,90	1.485.726,41	1.616.900,16	1.713.917,88	1.765.876,05
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	410.224,98	444.462,41	473.944,46	499.469,10	535.843,22
Jasa lainnya	331.702,85	359.158,01	386.919,91	403.676,44	425.804,80
PDRB	18.818.624,36	19.950.718,35	21.023.600,36	22.204.105,80	23.437.492,47

Sumber : Kabupaten Buleleng dalam Angka tahun 2020

Pertumbuhan PDRB atas harga konstan pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 5,55 %. Beberapa sektor yang memberi kontribusi pada PDRB Kabupaten Buleleng dengan pertumbuhan paling besar di atas 7 % adalah sektor Konstruksi (7,86%), Jasa Keuangan dan Asuransi (7,43%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (7,37%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,28%) dan Pengadaan Listrik dan Gas (7,24%), sedangkan sektor yang terus mengalami penurunan

dalam memberi kontribusi pada PDRB adalah Pertambangan dan Penggalian (-5,19%). Data secara lengkap disajikan pada pada tabel 2.5. berikut.

Tabel 2.5. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2015-2019 (Persen)

Sektor PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.08	3.18	2.76	3.70	6.03
Pertambangan dan Penggalian	-7.70	9.12	-6.07	-5.58	-5.19
Industri Pengolahan	7.58	3.47	2.92	5.74	4.77
Pengadaan Listrik dan Gas	2.88	7.83	3.98	5.58	7.24
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.71	5.41	5.29	2.06	2.71
Konstruksi	4.91	6.65	5.41	7.75	7.86
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.43	3.88	7.03	8.55	7.37
Transportasi dan Pergudangan	1.95	4.85	3.54	6.09	5.93
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.98	9.25	9.84	7.31	4.95
Informasi dan Komunikasi	9.90	9.76	9.25	6.91	5.57
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.66	6.55	2.84	2	7.43
Real Estat	3.03	2.45	5.39	4.01	4.10
Jasa Perusahaan	6.96	6.44	6.17	5.83	5.48
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.39	4.81	-2.84	3.02	3.52
Jasa Pendidikan	9.09	11.06	8.83	6	3.03
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.52	8.35	6.63	5.39	7.28
Jasa lainnya	7.61	8.28	7.73	4.33	5.48
PDRB	6.07	6.02	5.38	5.62	5.55

Sumber : Kabupaten Buleleng dalam Angka tahun 2020

B. Sektor Unggulan

Visi Misi Bupati Buleleng 2017-2022, yang sangat terkait dengan Pembangunan Ekonomi Daerah adalah misi 1 dan misi 2 yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022. misi 1 yaitu: “*Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif*”, misi ini bertujuan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dalam upaya mencapai 4 (empat) sasaran pokok yaitu: (1) Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; (2) Meningkatnya akses dan kesempatan kerja penduduk usia kerja/ produktif; (3) Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin dan (4) Meningkatnya kapasitas fiskal daerah untuk pembiayaan pembangunan. Selanjutnya pada misi 2, yaitu: “*Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk*

Unggulan Daerah”, misi ini bertujuan untuk berkembangnya produk unggulan daerah, diarahkan pada tiga sasaran pokok, yaitu 1) meningkatnya nilai produk pertanian; 2) berkembangnya industri berbasis komoditas unggulan daerah dan 3) meningkatnya jumlah dan daya saing UMKM serta koperasi.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Buleleng. Produk pertanian paling utama yaitu padi sawah dengan jumlah produksi pada tahun 2018 sebanyak 133.371 ton dengan luas panen seluas 21.318 Ha. Selain itu Kabupaten Buleleng memiliki wilayah pengembangan tanaman perkebunan rakyat (monokultur) yang cukup luas yaitu 8.086,27 ha pada tahun 2018 dengan jumlah produksi 2.332,27 ton (Dinas Statistik Kabupaten Buleleng, 2019).

Sektor perikanan dan kelautan juga menjadi sektor yang dapat memberi kontribusi pada upaya peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi daerah. Potensi ini dapat dijelaskan: *Potensi dan Produksi Perikanan Tangkap* Potensi perikanan laut seluas 1.166,75 km² untuk 4 mil, dengan produksi perikanan laut mencapai 18.265,5 ton (tahun 2019). Di samping itu potensi kelautan didukung oleh potensi yang dapat berkembang di wilayah sungai dan danau, yaitu: Danau Tamblingan dan Danau Buyan, perairan sungai, waduk dan saluran irigasi. Perairan umum ini memiliki potensi lestari sebesar 1.300 ton di mana pemanfaatannya melalui kegiatan penangkapan pada tahun 2019 sebesar 102,4 ton. Di samping itu Kabupaten Buleleng juga memiliki Potensi dan Produksi Perikanan Budidaya terdiri dari: 1) Potensi budidaya laut; 2) Potensi dan Produksi Budidaya Air Payau (Tambak); 3) Potensi dan Produksi Budidaya Kolam dan Minapadi dan 4) Potensi dan Produksi Pembenihan.

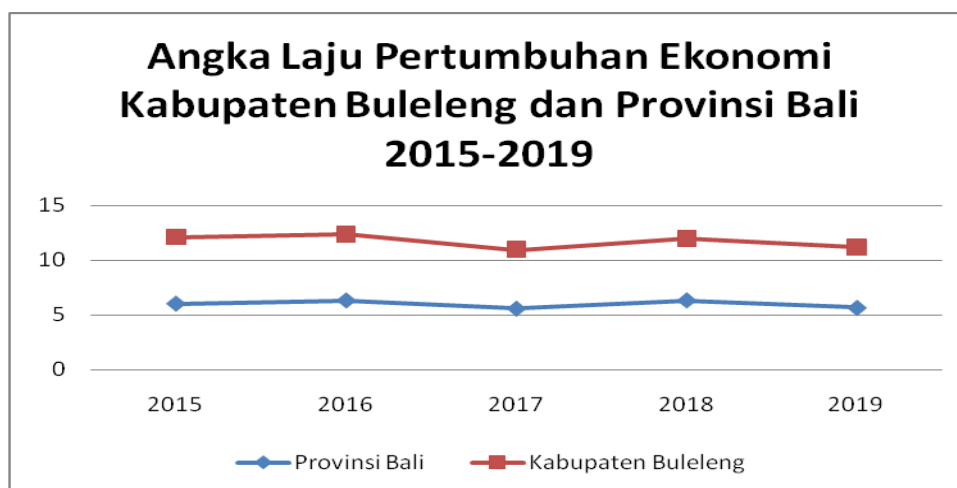
Sektor Koperasi dan UMKM juga menjadi sektor yang menjadi sasaran pokok pembangunan di Kabupaten Buleleng, sektor ini telah banyak menyumbang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah di bidang ekonomi. DiskopUKM mencatat UMKM Kabupaten Buleleng per 11 September 2019 terdapat 189 unit usaha menengah dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- sampai 10.000.000.000,- (dewi dan Sari, 2019). Jumlah pengusaha UMKM di Kabupaten Buleleng tahun 2019, tersebar di 9 Kecamatan mencapai 5.772 pengusaha, dengan total permodalan mencapai Rp. 147.750.186.373,- Berdasarkan (LKJip) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pada tahun 2019, merealisasikan anggaran sejumlah Rp. 1.525.026.860,- yang diperuntukkan untuk kegiatan 6 (enam), yaitu: a) program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif; b) program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM; c) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah; d) program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; e) program pengembangan usaha koperasi dan f) program pengendalian dan pengawasan koperasi.

Kabupaten Buleleng juga memiliki potensi pariwisata yang dapat diandalkan. Dalam LKJip Dinas Pariwisata menyumbang PAD RP. 3.871.500.000,- untuk tahun 2019 dengan capaian kunjungan wisata mencapai 1.084.168 terdiri dari wisatawan manca negara 314.409 orang dan domestik 769.759 orang, terjadi peningkatan kunjungan mencapai 25,71 % di banding tahun 2016. Jika dibandingkan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 kunjungan wisata mencapai 1.003.810 mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 7,41 %. Kegiatan pariwisata di Kabupaten Buleleng didukung oleh 25 produk wisata, atraksi wisata dan ekonomi kreatif yang meningkat pemahamannya tentang pengelolaan, produk dan pelayanan, serta 20 usaha jasa industri pariwisata yang mendaftarkan usahanya dan memenuhi standar usaha, serta juga didukung oleh 9 kelompok darwis yang meningkat pemahamannya tentang sapta pesona, kepada masyarakat penggiat wisata.

Pengembangan sektor industri dikembangkan dalam perencanaan daerah mengacu pada industri yang berbasis pada potensi daerah. Strategi yang dikembangkan adalah 1) mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis kawasan dan komoditas dan 2) mengembangkan aksesibilitas pemasaran pada hasil produksi. Pada sektor industri ini relatif masih kurang berkembang di Kabupaten Buleleng, sebagian besar industri yang berkembang disektor rumah tangga dan berkaitan dengan bahan pokok dan makanan serta kerajinan. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan program pengembangan sentra-sentra industri potensial dengan total anggaran mencapai Rp. 265.393.450,- pada tahun 2019. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri yang dimanfaatkan untuk mendorong hasil produk para pengrajin, kualitas produksi, menambah jumlah pengrajin dengan memberikan pembinaan dan pelatihan. Dengan Program ini diharapkan dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing serta bisa menambah pendapatan para pengrajin, dengan capaian anggaran Rp. 159.857.500,-. Dalam pembinaan IKM untuk meningkatkan kemampuan IKM, menciptakan produk yang berkualitas, meningkatkan wawasan dan pengetahuan pengrajin / pelaku industri kecil rumah tangga tentang teknik produksi yang berkualitas sesuai dengan tuntutan pasar dan menciptakan daya saing pemerintah Kabupaten merealisasikan anggaran sebesar Rp. 95.910.600,-

C. Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi makro suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Besarnya laju pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari PDRB harga konstan 2000. Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng dikomparasikan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dapat digambarkan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng & Provinsi Bali (sumber: Badan Statistik Prov. Bali 2020)

Laju implisit adalah Perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan pada periode tertentu. Nilai indeks implisit lebih dari 100 menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan harga dibandingkan dengan periode tahun dasar. Perhitungan PDRB ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerminkan kenaikan harga pada periode tertentu terhadap periode tahun dasar.

Tabel 2.6. Laju Implisit PDRB Kabupaten Buleleng Menurut Lapangan Usaha

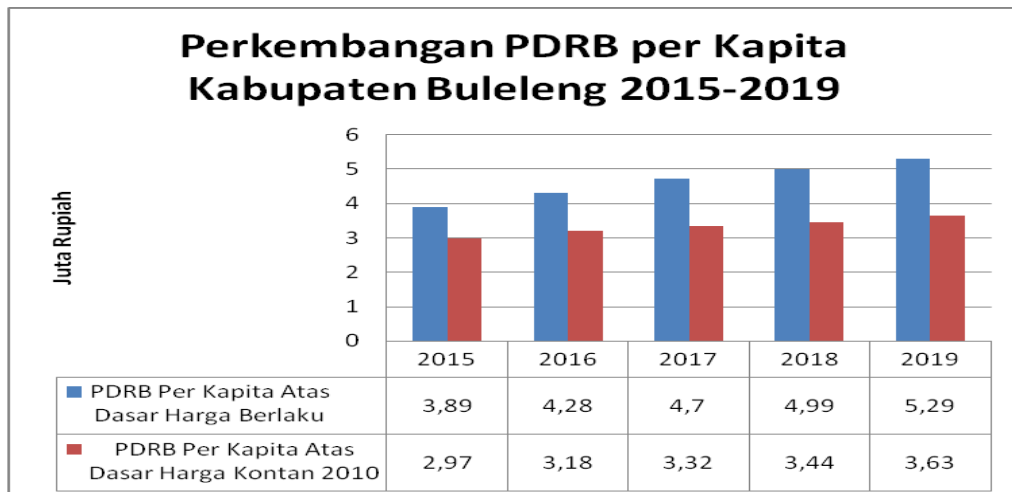
Sektor PDRB	Laju Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.94	5.90	3.08	2.90	1.73
Pertambangan dan Penggalian	7.26	2.56	2.99	6.98	0.63
Industri Pengolahan	8.57	4.84	3.79	3.48	1.65
Pengadaan Listrik dan Gas	37.38	19.85	21.82	4.27	1.86
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.73	3.73	5.85	0.19	0.18
Konstruksi	5.48	3.76	2.81	4.30	3.18
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.47	3.14	4.50	2.20	1.70
Transportasi dan Pergudangan	4.01	1.82	2.13	2.14	2.19
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.19	2.25	3.42	1.97	2.27
Informasi dan Komunikasi	3.68	1.50	2.43	2.08	1.37
Jasa Keuangan dan Asuransi	3	2.06	4.31	3.12	2.17
Real Estate	3.22	1.47	2	1.79	1.44
Jasa Perusahaan	9.55	6.13	3.39	2.36	1.71
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.70	3.53	13.27	5.16	2.28
Jasa Pendidikan	5.13	5.49	3.32	3.05	3.89
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.71	4.08	2.35	3.83	1.74
Jasa lainnya	6.24	3.32	4.77	2.07	2.19
PDRB	6.15	3.77	3.91	2.87	2.12

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng tahun 2020

D. Pendapatan Perkapita Penduduk

PDRB per kapita merupakan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan setiap penduduk rata-rata, sehingga dapat dijadikan salah satu indikator bagi keberhasilan pembangunan, terutama pembangunan di bidang ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam perkembangan Kabupaten Buleleng 5 (lima) tahun terakhir mengantarkan Kabupaten Buleleng menjadi penyumbang terbesar ketiga dalam pembentukan PDRB Provinsi Bali, setelah Kabupaten Badung dan Kodya Denpasar. Pada tahun 2015, PDRB per Kapita Kabupaten Buleleng yang didekati atas harga berlaku mencapai sekitar Rp. 3,89 juta meningkat menjadi sekitar Rp 5,29 juta pada tahun 2019. Sedangkan, PDRB per Kapita Kabupaten Buleleng yang didekati atas harga konstan pada tahun 2015 mencapai sekitar Rp. 2,97 juta meningkat menjadi sekitar Rp 3,63 juta pada tahun 2019. Secara absolut

PDRB Kabupaten Buleleng berada di bawah rata-rata provinsi Bali, dan terus mengalami peningkatan. PDRB perkapita belum dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Indikator ini hanya dapat digunakan untuk menggambarkan apakah ada peningkatan produktivitas pembangunan setiap orang. PDRB per kapita sebagai salah satu indikator produktivitas penduduk yang dapat dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk. Selanjutnya sebagai gambaran perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

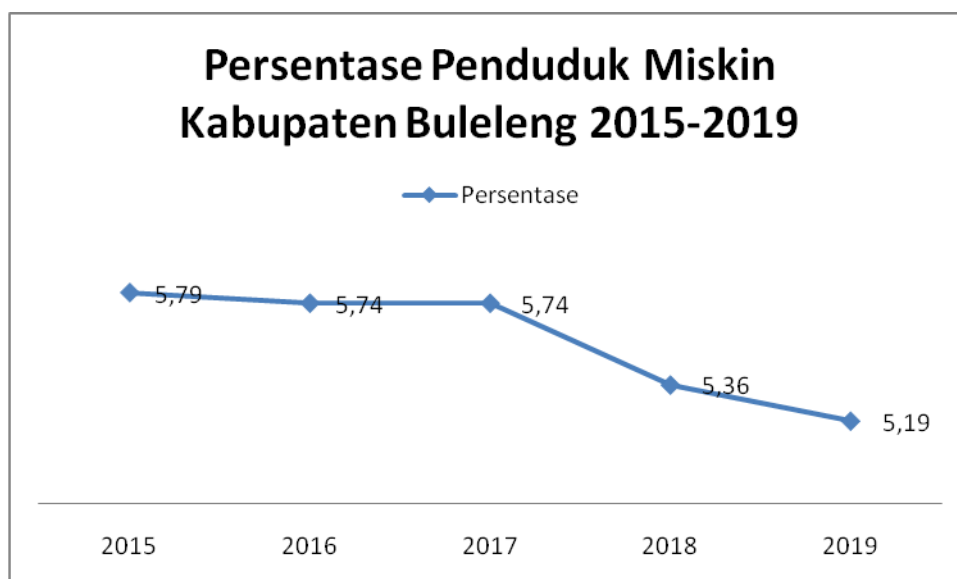


Gambar 2.2. Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah) Periode 2015 – 2019

E. Persentase Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan ditentukan dari penjumlahan dua komponen, yaitu 1) garis kemiskinan makanan, yaitu jumlah dari pengeluaran minimum makanan yang dapat disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari dan 2) garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum non makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan) yang dapat dipenuhi dari setiap penduduk.

Kalau dilihat dari perkembangan persentase penduduk miskin dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dari persentase keseluruhan jumlah penduduk, mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng mencapai 43.430 jiwa, turun pada tahun 2016 menjadi 37.550 jiwa dan terus mengalami penurunan menjadi 34.269 jiwa pada tahun 2019. Dilihat dari persentase penurunan penduduk miskin dapat digambarkan seperti grafik di bawah ini.



Gambar 2.3. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buleleng (Olah Data Buleleng Dalam Angka 2020)

Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Buleleng yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai 5,79 % dari total jumlah penduduk tahun 2015, mengalami penurunan tahun 2016-2017 menjadi 5,74 %, 5,36% tahun 2018 dan 5,74% pada tahun 2019. Penurunan jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Buleleng dalam memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan (berupa perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan) mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai 2019.

2.1.4. Aspek Kesejahteraan

Dalam mempermudah melakukan analisis aspek kesejahteraan, difokuskan pada bidang pendidikan, yang meliputi angka melek huruf, tingkat pendidikan yang dicapai penduduk. Indikator selanjutnya bidang kesehatan, yang menjadi fokus kajian adalah tentang angka (umur) harapan hidup penduduk Kabupaten Buleleng.

A. Angka Melek Huruf

Kemampuan baca tulis penduduk sangat dipengaruhi oleh minat baca dan perkembangan penyedia bahan bacaan bagi penduduk di Kabupaten Buleleng. Penyedia bahan bacaan telah berkembang dari tahun ke tahun, baik yang disediakan oleh perpustakaan daerah, perpustakaan keliling yang disediakan oleh dinas perpustakaan dan kearsipan daerah, perpustakaan yang dikembangkan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Buleleng. Perpustakaan juga berkembang disekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng baik ditingkat SD, SMP, maupun SMA/SMK/ sederajat. Dengan demikian dapat memacu minat baca masyarakat, sebab kemampuan baca tulis masyarakat dapat berpengaruh pada kemampuan untuk dapat menyerap informasi yang berguna bagi pembangunan daerah, maupun pembangunan lainnya guna mempercepat upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun perkembangan kemampuan baca tulis penduduk Kabupaten Buleleng sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel : 2.7. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Hurup Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Buleleng, 2018-2019

No	Menurut Umur	Tahun	
		2018	2019
1	15-19	100	100
2	20-24	99,14	99,59
3	25-29	100	100
4	30-34	100	100
5	35-39	100	98,16
6	40-44	99,19	99,5
7	45-49	88,77	93,47
8	50+	76,36	77,47
Total	15+	90,8	91,4

Sumber : Kabupaten Buleleng dalam Angka 2020

Jika dilihat data di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk di atas 15 tahun memiliki kemampuan baca tulis mencapai 90,80 % pada tahun 2018 dan meningkat pada tahun 2019 mencapai 91,40 % dari total jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2020, angka melek hurup Kabupaten Buleleng dalam Angka tahun 2019 adalah penduduk laki-laki mencapai 96,22% dan perempuan mencapai 86,71%. Dengan demikian tingkat melek hurup penduduk tergolong tinggi, sehingga memiliki kemampuan menyerap dengan cepat informasi tentang pembangunan daerah maupun informasi lainnya.

B. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, dapat dilihat dari pencapaian tingkat pendidikan penduduk. Tingkat pendidikan juga memiliki hubungan erat dengan kualitas sumberdaya manusia suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai penduduk, dapat menunjukkan tingkat kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki suatu daerah. Perkembangan tingkat pendidikan Kabupaten Buleleng dilihat dari tahun 2015 sampai 2019, terjadi perkembangan persentase dari keseluruhan jumlah penduduk secara fluktuatif, yang dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.8. Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Buleleng Menurut Pendidikan Yang Tertinggi yang Ditamatkan, 2015 – 2019.

No	Pendidikan Teritinggi Yang ditamatkan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tidak Punya Ijazah	28,11	36,40	26,39	27,72	28,47
2	Tamat SD Sederajat	28,21	29,51	25,30	26,18	25,88
3	SLTP Sederajat	15,74	15,87	19,04	18,47	18,50
4	SLTA Sederajat	22,33	22,41	22,99	21,19	19,97
5	D1-D2/D3	1,39	1,34	1,89	1,52	1,75
6	D4/S1-S3	4,21	3,55	4,39	4,91	5,43
		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2020

Menurut pencapaian tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Buleleng tahun 2019, usia 15 tahun ke atas telah menunjukkan peningkatan yang sangat baik, terbukti tamatan D4/S1-S3 terus mengalami peningkatan dari 4,21 % pada tahun 2015 mencapai 5,43% pada tahun 2019. Selain itu perkembangan harapan lama sekolah di Kabupaten Buleleng terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 mencapai 12,37 tahun dan tahun 2019 telah mencapai 12,91 tahun, ini berarti anak yang berusia 7 tahun dapat menamatkan sekolah tk SLTA/D1. Hal ini akan berpengaruh pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buleleng yang juga terus meningkat dari tahun 2015 mencapai 70,03 dan pada tahun 2019 telah mencapai 72,30.

C. Angka Harapan Hidup

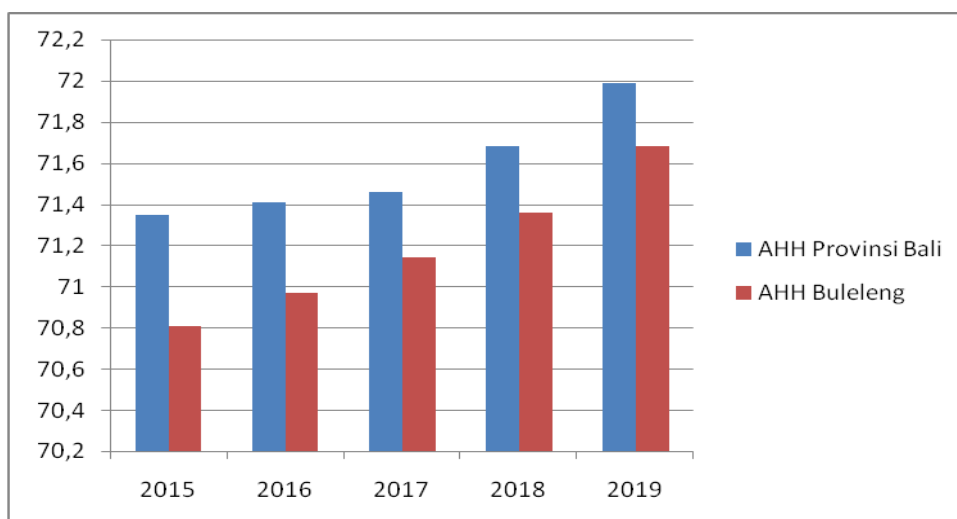
Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Angka harapan hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu daerah secara garis besar. Semakin tingginya angka harapan hidup di Kabupaten Buleleng menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Perkembangan angka harapan hidup penduduk Kabupaten Buleleng dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan meskipun masih berada dikisaran 70,81 s/d 71,68 tahun, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9. Angka Harapan Hidup Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali, 2015 – 2019

Kabupaten/Kota	Indek Pembangunan Manusia				
	Umur Harapan Hidup				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana	71.43	71.57	71,7	71,91	72,21
Tabanan	72.74	72.89	73,03	73,23	73,53
Badung	74.31	74.42	74,53	74,71	74,99
Gianyar	72.84	72.95	73,06	73,26	73,56
Klungkung	70.11	70.28	70,45	70,7	71,06
Bangli	69.54	69.69	69,83	70,05	70,37
Karangasem	69.48	69.66	69,85	70,05	70,35
Buleleng	70.81	70.97	71,14	71,36	71,68
Kota Denpasar	73.91	74.04	74,17	74,38	74,68
Provinsi Bali	71.35	71.41	71,46	71,68	71,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2016 – 2020

Jika dibandingkan antara usia harapan hidup Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng, dapat digambarkan bahwa untuk usia harapan hidup Kabupaten Buleleng rata-rata dibawah perkembangan usia harapan hidup Provinsi Bali, dan berada di atas tiga kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung. Perbandingan dengan Provinsi Bali dapat digambarkan sebagaimana grafik di bawah ini.



Gambar : 2.4. Grafik Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali

2.1.5 Aspek Ketenagakerjaan

Pertumbuhan dan peningkatan jumlah tenaga kerja harus diimbangi dengan kemampuan dalam menyerap tenaga kerja. Tata kelola tenaga kerja sangat diperlukan dalam pembangunan di daerah, tingkat tenaga kerja yang tinggi jika tidak dapat diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja dapat menciptakan tingkat pengangguran terbuka. Melihat perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan pencari kerja dari keseluruhan angkatan kerja, dapat dikatakan bahwa masih terdapat 2,11 % angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan atau pengangguran. Data secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buleleng, 2019

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase Dari Jumlah Penduduk
	Laki-Laki	Perempuan		
A. Angkatan Kerja	192.665	153.934	346.599	
1. Bekerja	184.285	151.834	336.119	67,56
2. Pengangguran Terbuka	8.380	2.100	10.480	2,11
B. Bukan Angkatan Kerja	52.7712	98.113	150.885	
1. Sekolah	21.867	21.000	42.867	8,62
2. Mengurus Rumah Tangga	15.808	65.328	81.136	16,31
3. Lainnya	15.097	11.785	26.882	5,40
Jumlah	245.437	252.047	497.484	

Sumber : Kabupaten Buleleng dalam Angka Tahun 2020

Pertumbuhan angkatan kerja di Kabupaten Buleleng menurut lapangan usaha dapat dijelaskan bahwa sektor yang paling besar menyerap tenaga kerja adalah di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan mencapai 137.481 tenaga kerja atau 37,02 % dari seluruh angkatan kerja, menyusul perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel mencapai 107.685 jiwa atau 28,99 %

dan sektor jasa kemasyarakatan mencapai 49.753 jiwa atau 13,40 %. Sedangkan sektor yang paling kecil menyerap tenaga kerja adalah pertambangan dan penggalian dan bidang usaha listrik, gas dan air, masing-masing 861 jiwa atau 0,23 % dan 1.851 atau 0,50 % pada tahun 2018.

Tabel 2.11. Angkatan Kerja yang Bekerja di Kabupaten Buleleng Menurut Lapangan Usaha, 2015 – 2018

Jenis Kegiatan	Tahun			
	2015	2016*	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan	123.397		114.159	137.481
Pertambangan dan Penggalian	1.459		985	861
Industri Pengolahan	32.293		44.619	35.559
Listrik, Gas dan Air	1.394		412	1.851
Bangunan	22.371		27.071	22.023
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	93.495		96.398	107.685
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	8.396		9.571	9.812
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah	11.408		6.909	6.343
Jasa Kemasyarakatan	51.113		57.983	49.753
Total	345.326		358.107	371.368

Sumber Buleleng dalam Angka 2019

Keterangan: *data tidak terisi dan perhitungan belum sampai ke tingkat Kabupaten

2.2. Kondisi Sumberdaya Kelitbangan

Dalam mendukung upaya pencapaian tugas dan fungsi kelitbangan Kabupaten/kota, diperlukan sumberdaya yang cukup, meliputi sumberdaya manusia sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, khususnya dibidang pengembangan IPTEK, sumberdaya keuangan, pengembangan jaringan (*networking*), dan kepemilikan sarana-prasaran pendukung. Semua faktor tersebut dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kelitbangan secara maksimal.

2.2.1. Kelembagaan

Pelaksanaan fungsi kelitbangan melekat dan dijalankan oleh satu bidang, yaitu Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah (Balitbang). Balitbang Kabupaten Buleleng dipimpin oleh Kepala Badan yang dibantu oleh Sekretaris Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang/Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretaris Badan membawahi dua kepala sub bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Balitbang Kabupaten Buleleng memiliki tiga Bidang, yaitu :

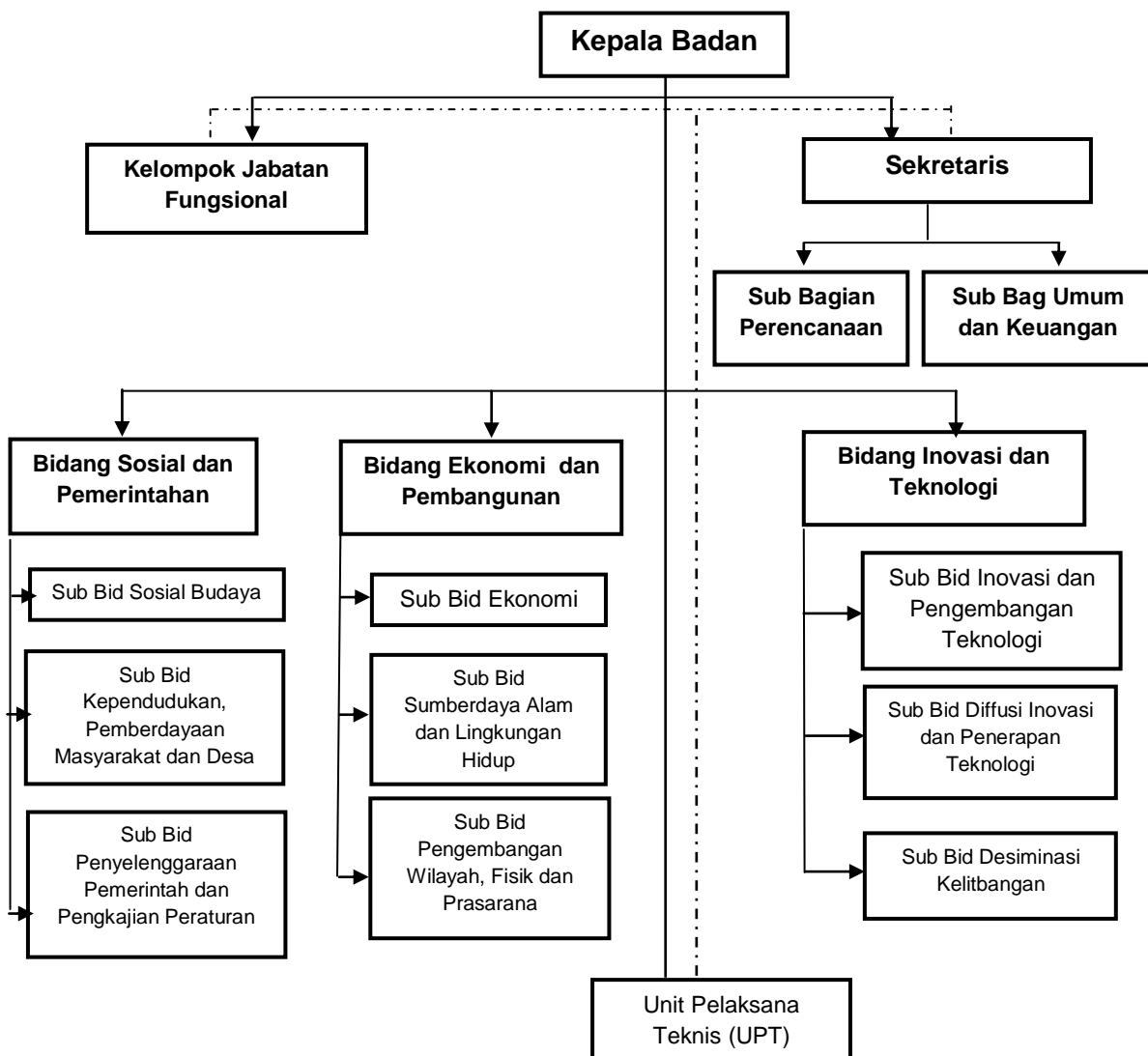
1. Bidang terdiri dari Bidang Sosial dan Pemerintahan yang membawahi tiga sub bidang, yaitu : 1) Sub Bidang Sosial dan Budaya; 2) Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan 3). Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

2. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari : 1) Sub Bidang Ekonomi; 2) Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dan 3) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.
3. Bidang Inovasi dan Teknologi, membawahi: 1) Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi; 2) Sub Bidang Diffusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan 3) Sub Bidang Desiminasi dan Kelitbangan.

Adapun struktur Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 03 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI BADAN LITBANG DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG (TIPE B)



Gambar 2.5. Struktur Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng (Sumber Balitbang Kabupaten Buleleng)

2.2.2. Sumber Daya Manusia Kelitbangan

Aparatur yang profesional, kompeten dan memiliki komitmen dalam pencapaian tugas dan fungsi kelitbangan sangat dibutuhkan. Profesional artinya aparatur bersangkutan memahami dan melaksanakan tupoksi dibidang tugas yang diberikan kepadanya, khususnya menyangkut keahlian di bidang kelitbangan. Kompeten bahwa aparatur kelitbangan memiliki keterampilan teknis, yang sesuai dengan bidang ataupun tupoksi yang dikerjakan. Sedangkan komitmen adalah wujud loyalitas kepada penyelesaian tugas dan fungsi yang diberikan.

Balitbang Kabupaten Buleleng memiliki sumberdaya manusia berjumlah 60 aparatur, baik tenaga PNS maupun tenaga kontrak. Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan terdapat 5 (lima) orang aparat atau 8,33% memiliki pendidikan Magister (S2), Sarjana (S1) sebanyak 22 orang atau 36,67%, terdiri dari 13 tenaga PNS dan 9 orang Tenaga kontrak, dan Tenaga D1-D3 berjumlah 5 orang atau 8,33%. Sedangkan yang masih setingkat SMA sederajat mencapai 29 orang atau 48,33%, terdiri dari 14 tenaga PNS dan 15 Tenaga Kontrak. Dilihat dari kompetensi SDM Balitbang Kabupaten Buleleng diperkuat oleh aparatur yang memiliki keahlian atau kompetensi: kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, ekonomi, manajemen, pariwisata, komputer, manajemen informatika, olah raga, dan filsafat agama. Sedangkan dilihat dari golongan ruang terdiri dari Pembina (IVa-IVc) berjumlah 5 orang, Penata (IIIb-IIIId) berjumlah 12 orang, Penata Muda berjumlah 3 orang dan Pengatur (IIa-IIc) berjumlah 10 orang, sisanya berjumlah 30 orang adalah pegawai kontrak.

2.2.3. Pendanaan Kelitbangan

Kecukupan sumberdana dan keuangan bagi kegiatan kelitbangan, sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian perencanaan kelitbangan dan inovasi daerah, dalam mendukung penyempurnaan dalam perumusan perencanaan dan kebijakan daerah, baik yang disusun melalui Organisasi Perangkat Daerah, maupun yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Balitbang Kabupaten. Penganggaran terhadap bidang penelitian dan pengembangan di Indonesia masih sangat tergolong kecil, dimana alokasi anggaran penelitian dan pengembangan di Indonesia tahun 2016 naik menjadi 0,2 persen dari sebelumnya 0,09 persen dihitung dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini juga berpengaruh pada penganggaran di balitbang daerah, namun demikian dengan kemampuan SDM yang ada diharapkan daerah dapat mengelola kelitbangan secara baik dan dapat meningkatkan hasil-hasil kelitbangan secara berkualitas, dan mampu memberikan dukungan yang optimal bagi pemerintah daerah.

Kegiatan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng bersumber dari Anggaran APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2020, penggunaan terhadap sumber dana anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan Kelitbangan dan InovDa sesuai dengan RINDUK 2020-2025 serta kegiatan operasional rutin Balitbang Inovda Kabupaten Buleleng. Secara umum sumberdana Balitbang Inovda dari APBD Kabupaten Buleleng dan penggunaannya untuk kegiatan Penyusunan Kajian dan Inovasi Daerah, Lomba Lomba Inovasi dan Pameran Kelitbangan.

2.2.4. Kerjasama Kelitbangan

Peningkatan kerjasama dengan mengembangkan jejaring (*networking*), dapat meringankan tugas-tugas kelitbangan, dalam menyikapi keterbatasan kompetensi sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber anggaran. Selain itu dengan adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan kelitbangan dapat

memberi sinergi positif bagi perkembangan daerah, dari sisi program, penilaian dan pengembangan potensi daerah, perpaduan sumberdaya dan kepentingan.

Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng telah dan akan melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dikalangan organisasi pemerintah, swasta, maupun kalangan perguruan tinggi, antara lain: Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Universitas Panji Sakti Singaraja, Universitas Empu Kuturan Singaraja, Universitas Udayana, Universitas Ngurah Rai, Universitas Warmadewa dan Universitas Dwijendra. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang telah disebutkan adalah berkaitan dengan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dalam hal penerapan teknologi, penggunaan tenaga ahli, dan sumberdaya lainnya yang dikerahkan dalam rangka melaksanakan kerjasama dibidang kelitbangan.

2.3. Potensi dan Permasalahan

Potensi kelitbangan Kabupaten Buleleng, sangat mendukung untuk mengembangkan kelitbangan di Kabupaten Buleleng secara optimal. Berdasarkan hasil diskusi dengan Badan kelitbangan Kabupaten maupun OPD, serta pendapat ahli (*expert*), dapat ditemukan sejumlah potensi yang memperkuat keberadaan kelitbangan di Kabupaten Buleleng, antara lain:

- 1) Adanya penguatan keberadaan lembaga kelitbangan di daerah melalui produk perundang-undangan, dan peraturan-peraturan pemerintah. Dengan demikian pelaksana kelitbangan di daerah mendapat mandat yang dari Undang-undang maupun peraturan pemerintah baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.
- 2) Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan dibidang kelitbangan. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya lembaga kelitbangan dan inovasi daerah melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 3) Adanya dukungan perguruan tinggi, baik yang ada di Wilayah Kabupaten Buleleng, maupun yang ada di wilayah Provinsi Bali, yang dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Iptek.
- 4) Potensi Kabupaten Buleleng yang sangat berkembang, khususnya di bidang pertanian, pariwisata dan perikanan.
- 5) Komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga seluruh OPD sudah terhubung jaringan fiber optik dan mempunyai server data basis lokal, sehingga sangat dimungkin untuk melakukan transfer data informasi secara cepat, yang sangat bermanfaat bagi perkembangan kelitbangan.

Selain potensi di atas, kelitbangan dan inovasi daerah Kabupaten Buleleng, juga memiliki sejumlah masalah antara lain :

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan program kerjasama baik antar daerah, dan dengan pihak perguruan tinggi dan swasta serta masyarakat.
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan daerah.
- 3) Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berbasis kelitbangan.
- 4) Belum tersedianya tenaga pejabat fungsional peneliti, perekayasa, analis kebijakan dan pejabat peneliti lainnya di Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

Dari uraian permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pokok dari Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng adalah “*belum optimalnya kinerja kelitbangan daerah*”.

2.4. Peluang dan Tantangan

Perubahan dalam pengelolaan pemerintahan daerah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah maka Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng melaksanakan urusan penunjang pemerintahan sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.

Peluang dalam pelaksanaan fungsi kelitbangan daerah adalah antara lain sebagai berikut :

- 1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung fungsi kelitbangan daerah dan meningkatkan hasil dan kualitas kelitbangan;
- 2) Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur Daerah dalam menyusun perencanaan dan keputusan berbasis kelitbangan;
- 3) Memberi kesempatan kepada Sumber Daya Aparatur untuk meningkatkan kompetensinya di bidang kelitbangan melalui pelatihan-pelatihan dan bimtek yang ada;
- 4) Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan inovasi pembangunan daerah;
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan hasil kelitbangan;
- 6) Meningkatkan kolaborasi, kerjasama dan sinergitas antar sektor pemerintahan, dengan pihak lainnya, berpedoman pada RINDUK Kabupaten Buleleng.

Tantangan yang akan dihadapi oleh Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan kelitbangan daerah antara lain sebagai berikut :

- 1) Dinamika regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait fungsi kelitbangan daerah, sehingga dituntut hasil-hasil kelitbangan yang berkualitas dan mampu mendukung kebijakan daerah;
- 2) Belum tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam jabatan fungsional keahlian meliputi Pejabat Fungsional Peneliti, Pejabat Fungsional Perekayasa, Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dan Pejabat fungsional lainnya yang terkait dengan fungsi kelitbangan;
- 3) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi kelitbangan daerah;
- 4) Perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi yang sangat dinamis;
- 5) Perkembangan Kabupaten Buleleng dan daerah hinterlandnya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan daerah bertumpu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Buleleng tahun 2005-2025. Dengan demikian arah kebijakan kelitbangan juga mengacu pada penguatan dan keselarasan antara arah kebijakan jangka panjang Kabupaten Buleleng dengan arah kebijakan kelitbangan Kabupaten Buleleng, untuk mencapai visi misi RPJP Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025.

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Buleleng tahun 2005-2025 menguraikan kebijakan pembangunan pada masing-masing misi. Dari ke 5 (lima) misi yang ditetapkan, misi 1 (satu) dan misi 5 (lima), yang paling relevan dengan kelitbangan. Adapun arah pembangunan pada misi 1 (satu) “Mewujudkan Masyarakat yang Unggul dan Kompetitif” adalah pembangunan sumberdaya manusia yakni pembangunan pendidikan dan kesehatan yang diarahkan untuk mencapai 6 (enam sasaran pokok) yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, bermoral, dan kompetitif.
2. Meningkatkan indeks pembangunan manusia.
3. Meningkatkan rata-rata lama sekolah menjadi ≥ 12 tahun
4. Meningkatkan rata-rata usia harapan hidup menjadi ≥ 75 tahun
5. Menurunkan pertumbuhan penduduk menjadi $\leq 0,9$ % per tahun.
6. Meningkatkan penguasaan sains dan teknologi, yang ditandai dengan perolehan hak atas kekayaan intelektual.

Misi ke 5 (lima), “Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”, diarahkan pada upaya pencapaian pembangunan sumber daya alam dan lingkungan untuk :

1. Melestarikan dan mengembangkan kemampuan sumberdaya alam menopang kegiatan pembangunan.
2. Merehabilitasi dan mencegah lahan kritis, abrasi pantai, dan pencemaran lingkungan.
3. Meningkatkan luas dan kualitas hutan dan vegetasi penutupan DAS menjadi sekurang-kurangnya 30%.
4. Meningkatkan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan menjadi sekurang-kurangnya 30 %.
5. Mewujudkan infrastruktur deteksi dini dan infrastruktur tanggap darurat terhadap bencana.
6. Mewujudkan pembangunan yang merata, antar lapisan masyarakat, antar sektor dan antar wilayah.
7. Mewujudkan tata guna lahan sesuai rencana tata ruang.

Masing-masing sasaran pokok dalam realisasi misi pembangunan memiliki tahapan pencapaian, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dicapai dalam kurun waktu 20 tahun, yang dibagi menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu RPJM tahap I (Tahun 2007-2012); RPJM tahap II (Tahun 2012-2017); RPJM tahap III (Tahun 2017-2022) dan RPJM tahap IV (Tahun 2022-2025). Tahapan RPJP, yang terkait dengan

RINDUK ini adalah RPJM tahap III (Tahun 2017-2022), yang menjadi tujuan utama tahapan ini adalah Penuntasan wajib belajar 12 tahun, asuransi kesehatan untuk semua, dan penguasaan sains dan teknologi. Hasil-hasil kelitbangan pada periode ini diarahkan pada upaya mencapai agenda prioritas pembangunan tahap ke III, yaitu:

1. Penuntasan wajib belajar 12 tahun dan pemantapan kualitas pendidikan baik bidang ilmu maupun budi pekerti.
2. Pemantapan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan untuk semua warga.
3. Peningkatan akses penduduk miskin terhadap sumber daya produktif, sehingga mereka mandiri dan tidak miskin lagi.
4. Pemantapan daya saing dan keseimbangan perekonomian di sektor-sektor pertanian, industri, dan pariwisata didukung oleh infrastruktur yang handal dan investasi.
5. Penegakan hukum dan tramtib, serta pemantapan kualitas pelayanan publik yang murah, cepat, transparan dan akuntabel.
6. Memantapkan daya dukung lingkungan terhadap pembangunan.

3.1.2. Visi dan Misi

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng pada RPJP Tahun 2005-2025 memberikan arah Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng, yang terus dirumuskan dan direalisasikan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng. Isu Strategis yang melandasi penetapan Visi pembangunan daerah pada RPJP 2005-2025, serta berkaitan erat dengan kelitbangan adalah sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Identifikasi Isu Strategis RPJP Kabupaten Buleleng 2005 – 2025

No	Bidang	Isu Strategis
1	Bidang Sosial Dasar dan Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>kependudukan</i> menyangkut jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin meningkat; b) <i>bidang kesehatan</i> masih rendahnya kualitas kesehatan penduduk; c) <i>pembangunan pendidikan</i> adalah masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk; d) <i>ketenagakerjaan</i> masih banyak angkatan kerja yang tidak bekerja yang membutuhkan pekerjaan; dan e) <i>penanggulangan kemiskinan</i>, masih banyak rumah tangga miskin yang perlu diantarkan dari kemiskinan
2	Bidang Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>pertumbuhan ekonomi</i>, belum mampu mengimbangi upaya mengentaskan penduduk miskin dan pertumbuhan angkatan kerja; b) <i>distribusi pendapatan</i> belum mampu meminimalisasi kesenjangan antara sektor, antar wilayah dan antar lapisan masyarakat; c) <i>Pertanian</i> adalah sumber terbesar pembentuk PDRB Kabupaten Buleleng, tidak didukung dengan perluasan lahan, dan SDM bidang pertanian secara kualitas rendah; d) <i>Peternakan dan perikanan</i> membutuhkan pengembangan teknologi budidaya ternak dan perikanan; e) <i>Sektor industri</i> meningkatkan kontribusi industri pada PDRB agar terjadi perubahan struktur ekonomi dan meningkatkan kemampuan industri menyerap tenaga kerja; f) <i>Pariwisata</i>, pengembangan pariwisata Buleleng seharusnya berbasis potensi lokal; g) <i>Investasi</i>, minat investasi masih rendah, perlunya infrastruktur penunjang investasi; dan h) <i>Bidang ekspor</i>, meningkatkan daya saing produk ekspor

No	Bidang	Isu Strategis
3	Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> a) masih rendahnya penguasaan masyarakat pada umumnya atas ilmu pengetahuan dan teknologi; b) masih belum optimal pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk aktivitas produktif; dan c) masih langka perolehan hak paten. Di Kabupaten Buleleng ada banyak perguruan tinggi dengan tenaga peneliti yang potensial menghasilkan paten.
4	Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>bidang politik</i>; persaingan tidak sehat dalam memperebutkan dukungan rakyat, belum terlaksananya fungsi-fungsi Partai Politik dan kepentingan rakyat untuk memperoleh hak-hak dasarnya belum tersalurkan sesuai harapan; b) <i>bidang hukum</i>: adanya kekosongan hukum dan masih ada kasus-kasus pelanggaran hukum yang belum diselesaikan secara tuntas. c) <i>bidang Pemerintahan</i>; rakyat belum sepenuhnya merasakan pelayanan pemerintahan yang diharapkan.
5	Bidang Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>bidang keamanan</i> adalah masih adanya tindakan-tindakan kriminal di wilayah Kabupaten Buleleng. b) <i>ketentraman</i> adalah mewujudkan rasa tenteram dalam kehidupan masyarakat. c) <i>bidang ketertiban</i>, masih ada perilaku menyimpang di masyarakat yang mengganggu ketertiban masyarakat.
6	Bidang Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a) Transportasi darat, masih terdapat jalan rusak pada ruas jalan hampir di seluruh wilayah kecamatan, sistem jaringan transportasi darat tidak berfungsi sesuai harapan masyarakat b) transportasi laut adalah adanya kebutuhan angkutan penumpang dan barang dengan transportasi laut, sebagai alternatif transportasi darat. c) transportasi udara adalah adanya kebutuhan angkutan penumpang dan barang dengan transportasi udara dari dan ke Kabupaten Buleleng agar lebih cepat. d) pembangunan irigasi adalah jaringan irigasi belum optimal masih banyak dijumpai jaringan irigasi yang rusak sebagai akibat keterbatasan kemampuan pemerintah daerah memelihara jaringan irigasi. e) sarana prasarana lingkungan: peningkatan sarana air bersih, perlu pengelolaan air limbah, sarana persampahan, drainase, f) telekomunikasi perlu penataan menara yaitu pemanfaatan menara bersama antar operator g) energi listrik, memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga yang belum memperoleh listrik dan memenuhi kebutuhan listrik h) Sarana prasarana sosial, mewujudkan tingkat hunian satu rumah untuk satu KK, maka perlu penyediaan perumahan bagi masyarakat secara merata dan peningkatan kualitas perumahan bagi masyarakat
7	Bidang Pengembangan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a) penggunaan ruang adalah perlu dipaduserasikan penggunaan ruang dengan pemerintah perbatasan, provinsi dan pemerintah pusat mengingat fungsi-fungsi kawasan yang ada di wilayah kabupaten juga merupakan sisten tata ruang provinsi; b) lahan kritis yang luas adalah menjadikan lahan kritis lahan yang produktif yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk yang terus bertambah c) bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah mengatur pemanfaatan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan penduduk

Sumber : RPJP Kabupaten Buleleng Tahun 2005 – 2025

Berdasarkan isu-isu strategis di atas melahirkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025, yaitu “*Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana*”.

Tabel 3.2. Pokok-Pokok Visi dan Penjelasan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng (RPJP) 2005 – 2025

Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Kerta Raharja	Buleleng aman dan sejahtera
Mengantarkan Bali Dwipa Jaya	Buleleng berada pada garda terdepan menuju Bali Dwipa Jaya
Berlandaskan <i>Tri hita Karana</i>	Pembangunan Buleleng berlandaskan filsafat hidup masyarakat Bali agar mencapai kebahagiaan a. Filsafat harmoni <i>parhyangan</i> yang maknanya hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha esa, b. Filsafat harmoni <i>Pawongan</i> yang bermakna hubungan manusia dengan sesama manusia c. Filsafat harmoni <i>palemahan</i> yang bermakna hubungan manusia dengan lingkungan

Visi ini, selanjutnya dijabarkan kedalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang sehat yang unggul dan kompetitif
2. Mewujudkan masyarakat Buleleng yang sejahtera
3. Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat
4. Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan jaman dan lingkungan global
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

Dari kelima misi di atas terdapat dua misi yang sangat relevan dengan pengembangan kelitbangan Kabupaten Buleleng, yaitu misi pertama dan misi kelima, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi semua warga masyarakat.
2. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.

Kedua Misi tersebut dapat mendorong terwujudnya proses pembangunan yang berbasis pada kebutuhan daerah, yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai dan memiliki kemampuan ilmu dan teknologi, guna mewujudkan pembangunan daerah yang partisipatif, dan berkelanjutan. Pemanfaatan IPTEK dalam mewujudkan program-program pembangunan dalam memperkuat sistem kelembagaan ekonomi dan penguatan kebijakan daerah, yaitu 1) kebijakan umum di bidang inovasi dan pembangunan daerah, 2) penguatan kelembagaan dan daya dukung IPTEK, 3) kerjasama pembangunan dan pemanfaatan IPTEK, 4) mengembangkan budaya inovasi dan kewirausahaan, 5) kolaborasi dan kemitraan dalam pembangunan daerah berkelanjutan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah

Arah Kebijakan Kelitbangan Daerah disusun dengan mempertimbangkan: 1) dukungan terhadap pencapaian Visi Misi Kepala Daerah periode 2017-2022, 2) arah kebijakan dan strategi Pembangunan Daerah Jangka Panjang, dan 3) Arah kebijakan dan strategi Bidang Litbang Kementerian Dalam Negeri. Visi Bupati Buleleng dan Wakil Bupati Buleleng Periode Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera Dan Berdaya Saing Berlandaskan *Tri Hita Karana*”

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Buleleng sebagai Kabupaten yang sedang berkembang berwawasan lingkungan akan menjadi kabupaten yang handal dan maju dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Visi itu bermakna sebagai berikut :

1. **Mandiri** mengandung makna: kemampuan pemerintah daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. **Sejahtera** mengandung makna: terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
3. **Berdaya Saing** mengandung makna: kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
4. **Berlandaskan *Tri Hita Karana*** mengandung makna: berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah Kabupaten Buleleng menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Penjabaran Visi Daerah dalam Misi Daerah :

Berdasarkan Visi tersebut, ditetapkanlah Misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut :

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Dari Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng pemerintah membentuk Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah. Badan Litbang dan Inovasi Daerah merupakan perangkat daerah yang baru dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan dan Inovasi Daerah dibidang penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pencapaian Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, maka dalam melaksanakan fungsi kelitbangan daerah diarahkan pada terwujudnya visi misi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017-2022 yaitu pada misi keempat **“Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan”**. Namun dalam pelaksanaannya akan memfasilitasi seluruh pencapaian misi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng. Berdasarkan Visi dan Misi Daerah Balitbang menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut (sesuai dalam renstra):

Sebagai upaya efektivitas penyelenggaraan pembangunan agar lebih fokus dalam kerangka pencapaian indikator target tujuan dan sasaran Renstra Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan Renstra Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 – 2025.

3.2.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, dalam mengemban tugas dan kewenangannya. Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan, dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi dan arah kebijakan yang tepat menjadi sangat penting.

Arah kebijakan dan strategi merupakan suatu respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dirumuskan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan dukungan terhadap strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Buleleng sebagai berikut.

Tabel 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Memantapkan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif			
1. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Memetakan potensi, permasalahan, dan merumuskan alternatif pemecahan masalah pembangunan ekonomi. • Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meminimalkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi kawasan • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		hambatan-hambatan investasi <ul style="list-style-type: none"> • Menyeimbangkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian • Meningkatkan nilai tambah produk daerah 	
	2. Meningkatnya akses dan kesempatan kerja penduduk usia kerja/produktif	Peningkatan penyerapan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja agar mempunyai daya saing • Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan di tingkat pemula dan menengah dalam mendukung inovasi dan kreativitas
	3. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial • Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial/masyarakat miskin
	4. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah untuk pembiayaan pembangunan	Memantapkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah	Meningkatkan penerimaan daerah dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Misi 2: Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis produk unggulan daerah			
1. Berkembangnya produk unggulan daerah	1. Meningkatnya nilai produk pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sarana dan prasarana produksi • Meningkatkan pemasaran hasil produksi 	Meningkatkan nilai produk pertanian
	2. Berkembangnya industri pengolahan berbasis komoditas unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis kawasan dan komoditas • Mengembangkan aksesibilitas pemasaran 	Membangun industri pengolahan berbasis komoditas produksi masyarakat
	3. Meningkatnya jumlah dan daya saing UMKM serta koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat dan memfasilitasi penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi • Mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM dan Koperasi • Meningkatkan daya saing produksi masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		masyarakat marginal • Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan daerah	
Misi 3: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, berbudaya dan berintegritas			
1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang profesional, berbudaya, dan berintegritas	1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan sembilan tahun • Peningkatan akses dan investasi sarana dan prasarana pendidikan
	2. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran serta pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan • Meningkatkan upaya pemasyarakatan olahraga pada masyarakat 	Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dan membudayakan olah raga.
	3. Meningkatnya status kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan sampai ke pelosok perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan aksesibilitas, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan khususnya masyarakat miskin • Mendekatkan pelayanan paripurna dengan masyarakat di seluruh pelosok wilayah • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan BLUD RSUD • Meningkatkan ketersediaan tenaga kerja medis dan para medis, terutama untuk pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil dan tertinggal.
	4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
	5. Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemenuhan cakupan Keluarga Berencana (KB) • Meningkatkan aksesibilitas data mikro keluarga dan penguatan peran stakeholder dalam pengendalian penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan peran PLKB dalam perluasan cakupan pelayanan KB • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian penduduk dan pengendalian kelahiran
Misi 4: Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Semakin mantapnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan	1. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah • Pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan pemberdayaan perempuan • Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan • Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan • Pelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
		Mengembangkan sebaran investasi PMDN dan PMA	Menciptakan iklim investasi yang kondusif
Misi 5: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik			
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik	1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Pemetaan kebutuhan dan pembangunan infrastruktur daerah dan pemeliharaan infrastruktur daerah	Memetakan kebutuhan infrastruktur dan melaksanakan pembangunan infrastruktur daerah dan Membangun infrastruktur daerah dengan kuantitas sesuai kebutuhan dan kualitas yang baik.
Misi 6: Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan			
1. Terwujudnya pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan	2. Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penggalian, pengembangan, dan pelestarian kebudayaan Bali yang adiluhung • Meningkatkan penggalian, pengembangan, dan pelestarian kesenian berbasis budaya Bali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pemeliharaan kebudayaan daerah yang memiliki keunikan dan adiluhung • Menumbuhkembangkan suasana kebebasan berkreasi di bidang seni dan budaya • Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan kesenian dan kebudayaan • Melestarikan kesenian-kesenian khas Buleleng
	3. Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Melaksanakan pembangunan sesuai peruntukan ruang dan berkelanjutan	Menjaga kualitas lingkungan hidup

Sumber : RPJMD Kabupaten Buleleng 2017 – 2022

Mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Buleleng yang sudah berlandaskan pada pokok kebutuhan pembangunan di Kabupaten Buleleng. Untuk melaksanakan Arah

dan Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah, Badan Kelitbang Kabupaten Buleleng merumuskan arah kebijakan, dimaksudkan sebagai panduan bagi Bidang Litbang dan Inovda khususnya, dan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Buleleng secara umum dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi, dan pelaporan kelitbang dalam upaya mendorong inovasi daerah. Arah kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan 1) dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2017-2022; 2) arah kebijakan dan strategi daerah jangka panjang 2005-2025; dan 3) arah kebijakan dan strategi Badan Litbang Kementerian dalam Negeri, sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2016.

Adapun arah kebijakan Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2020 – 2025 dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan jaringan sistem dan mekanisme kerja sama sebagai bagian dari pengembangan pelayanan pembangunan, dan perlindungan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kajian/penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Bimtek, Diklat dan rekrutmen tenaga fungsional keahlian.
4. Mengembangkan teknologi dan membangun jaringan informasi.

3.2.2. Strategi

Balitbang Inovda Kabupaten Buleleng melaksanakan strategi sebagai berikut:

1. Mendorong terwujudnya kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kelitbang dengan berbagai lembaga/institusikelitbang.
2. Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah.
3. Mendorong meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.
4. Melakukan difusi dan meningkatkan desiminasi pengembangan inovasi daerah.

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan dari Renstra Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 – 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4. Matriks Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, Arah Kebijakan dan Strategi Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 – 2025

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Indikator (3)	Arah Kebijakan (4)	Strategi (5)
Meningkatnya kualitas kelitbang daerah sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah.	1.Kelitbang daerah yang inovatif dan implementatif.	Pemanfaatan hasil kelitbang daerah.	Meningkatkan jaringan sistem dan mekanisme kerjasama sebagai bagian dari pengembangan pelayanan pembangunan, dan perlindungan kepada masyarakat.	Mendorong terwujudnya kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kelitbang dengan berbagai lembaga/institusi kelitbang

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Indikator (3)	Arah Kebijakan (4)	Strategi (5)
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas kajian/ penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah	Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah.
			Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Bimtek, Diklat dan rekrutmen tenaga fungsional keahlian	Mendorong meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.
	2.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Buleleng yang mandiri dan berdaya saing.	Penghargaan Inovasi dan Teknologi.	Mengembangkan teknologi dan membangun jaringan informasi.	Melakukan difusi dan meningkatkan desiminasi pengembangan inovasi daerah.

Adapun sasaran-sasaran yang ingin dicapai dari strategi dan arah kebijakan di atas adalah sebagai berikut :

1. Mendorong terwujudnya kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kelitbangan dengan berbagai lembaga/institusi kelitbangan, sasaran pokoknya adalah :
 - a) Sosialisasi rencana induk Kelitbangan (Rinduk) dan Rencana Kerja Tahunan Kelitbangan kepada berbagai level dan lingkup pemangku kepentingan baik yang berasal dari unsur pemerintah/non pemerintah, LSM Perguruan Tinggi, dan Kelompok masyarakat yang melaksanakan tugas berkaitan dengan kelitbangan.
 - b) Mengembangkan kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui konsorsium riset daerah, guna meningkatkan kemampuan daerah dalam mendukung dan mendorong pengembangan ilmu dan teknologi di daerah dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan dan pembangunan di daerah.
 - c) Membangun kesepahaman dan kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi dan pihak swasta, dan mewujudkan dalam bentuk konsorsium riset daerah guna meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan.
 - d) Mengembangkan skema insentif kepada peneliti luar, agar termotivasi untuk mengadakan penelitian di Kabupaten Buleleng sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan daya saing daerah.
 - e) Kerjasama dana di bidang kelitbangan, guna dapat mempercepat kemampuan daerah dalam mewujudkan peran dan fungsi kelitbangan di daerah.
2. Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah, dengan sasaran pokok :
 - a) Mendorong pengembangan dan penerapan hasil kelitbangan dalam mendorong peningkatan kualitas kebijakan di daerah, dan upaya meningkatkan daya saing produk unggulan di daerah.

- b) Mempermudah dan memfasilitasi pendaftaran paten dan HAKI dan berbagai fasilitasi yang dibutuhkan dalam mengurus paten maupun HAKI.
 - c) Mendorong dan memfasilitasi publikasi hasil-hasil kelitbangan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.
 - d) Mengembangkan fasilitas kelitbangan yang dimiliki daerah dengan mengembangkan pola kemitraan dan kerjasama antara lembaga dibidang penyediaan sarana dan prasarana kelitbangan.
 - e) Menetapkan standar baku kelitbangan sesuai standar pelaporan kelitbangan yang ditetapkan dalam peraturan daerah maupun peraturan lain yang menyangkut pelaksanaan kelitbangan.
 - f) Mengembangkan sistem pelaporan yang memungkinkan adanya partisipasi publik (seperti seminar, diskusi publik)
3. Mendorong meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.
- a) Melakukan pemetaan mengenai keahlian yang dibutuhkan dalam mengembangkan kebutuhan tenaga peneliti di masa mendatang.
 - b) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kelitbangan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, magang, dan melibatkan SDM dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti simposium, loka karya, seminar dan kerjasama dibidang kelitbangan.
 - c) Rekrutmen tenaga kelitbangan dan meningkatkan pemenuhan tenaga fungsional peneliti.
 - d) Kerjasama pemanfaatan SDM kelitbangan dan tenaga ahli baik dari unsur pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya.
4. Melakukan difusi dan meningkatkan desiminasi pengembangan inovasi daerah, dengan sasaran pokok yang ingin dicapai adalah:
- a) Memperluas desiminasi hasil-hasil kelitbangan dengan memanfaatkan media cetak maupun elektronik
 - b) Mengembangkan basis data dan sistem informasi dalam mendukung kelitbangan dalam upaya memberi akses dan pengembangan partisipasi masyarakat di bidang kelitbangan
 - c) Rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia bidang Teknologi dan Informasi guna mendukung kegiatan kelitbangan.
 - d) Mengembangkan pola kerjasama dibidang publikasi hasil-hasil kelitbangan, baik secara nasional maupun internasional.

3.3. Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah

Program prioritas kelitbangan disusun didahului dengan mengidentifikasi isu-isu pokok yang berkembang di Kabupaten Buleleng, dengan dirumuskan sesuai dengan bidang-bidang yang diatur dalam Permendagri No. 17 Tahun 2016, yaitu : 1) tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, 2) sosial dan kemasyarakatan, 3) ekonomi dan pembangunan daerah dan 4) inovasi dan pengembangan IPTEK. Berdasarkan arah kebijakan dan strategi kelitbangan Kabupaten Buleleng tahun 2020-2025, dan pengembangannya berpedoman pada isu strategis yang telah dibahas dalam FGD, dalam rangka penyusunan RINDUK Kabupaten Buleleng, aktualisasi kelitbangan Kabupaten Buleleng dirumuskan agenda strategis dan strategi kelitbangan kabupaten dirumuskan sebagai berikut.

3.3.1. Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, strateginya adalah :

- a. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan masyarakat
- b. Meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah
- c. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan sampai ke pelosok perdesaan
- d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar

3.3.2. Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan, strateginya adalah :

- a. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan
- b. Meningkatkan pemenuhan cakupan Keluarga Berencana (KB)
- c. Pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan
- d. Meningkatkan penggalan, pengembangan, dan pelestarian kebudayaan Bali yang adiluhung

3.3.3. Program Prioritas Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah, dengan strategi yang dikembangkan :

- a. Memetakan potensi permasalahan dan merumuskan alternatif pemecahan masalah pembangunan ekonomi
- b. Menyeimbangkan pertumbuhan dan pemerataan prekeonomian
- c. Mengembangkan sarana dan prasarana produksi
- d. Mengembangkan aksesibilitas pemasaran
- e. Menguatkan dan memfasilitasi penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi
- f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan daerah
- g. Peningkatan iklim penanaman modal dan usaha
- h. Pemetaan kebutuhan dan pembangunan infrastruktur daerah dan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah
- i. Melaksanakan pembangunan sesuai peruntukan ruang dan berkelanjutan

3.3.4. Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek, dengan strategi yang dikembangkan :

- a. Peningkatan jumlah dan mutu penelitian, pengembangan dan inovasi daerah
- b. Mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi dan Informasi melalui perencanaan dan pengembangan TIK guna menunjang akselerasi pembangunan daerah.

Penetapan program prioritas ini masih mengacu pada program yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022, yang masih harus dibahas lebih lanjut untuk menentukan program prioritas dan disesuaikan dengan Permendagri 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan mengacu pada Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk program kelitbangan periode tahun 2020-2025. Penyesuaian dan pembahasan dilaksanakan pada pelaksanaan FGD bersama organisasi perangkat daerah yang memiliki kepentingan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selanjutnya sinergitas agenda strategis dan program prioritas kelitbangan Kabupaten Buleleng Tahun 2020 – 2025 tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.5. Sinergitas Agenda Strategis, dan Program Prioritas Kelitbangan Kabupaten Buleleng 2020 – 2025

Agenda Strategis	Strategi	Program Prioritas
A. Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan masyarakat	1. Program Kepegawaian Daerah 2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah 3. Program Penguatan Maturitas SPIP 4. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 5. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Program Prioritas Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 8. Program Pembinaan Perpustakaan 9. Program Pencegahan Bahaya Kebakaran 10. Program Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Non Kebakaran
	2. Meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah	1. Program Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	3. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan sampai ke pelosok perdesaan	1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar	1. Pemberdayaan Sosial
B. Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	1. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan	1. Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan
	2. Meningkatkan pemenuhan cakupan Keluarga Berencana (KB)	1. Program Perlindungan Khusus Anak 2. Program Pemenuhan HAK Anak 3. Program Pembinaan Keluarga Berencana
	3. Pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan	1. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
	4. Meningkatkan penggalan, pengembangan, dan pelestarian kebudayaan Bali yang adiluhung	1. Program Pengembangan Kebudayaan 2. Pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya
C. Program Prioritas Bidang Pembangunan ekonomi dan Pembangunan Daerah	1. Memetakan potensi permasalahan dan merumuskan alternatif pemecahan masalah pembangunan ekonomi	1. Program Perekonomian dan Pembangunan
	2. Menyeimbangkan pertumbuhan dan	1. Program Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Agenda Strategis	Strategi	Program Prioritas
	pemerataan prekonomian	2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
	3. Mengembangkan sarana dan prasarana produksi	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	4. Mengembangkan aksesibilitas pemasaran	1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Program Peningkatan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 3. Program Pemasaran Pariwisata
	5. Menguatkan dan memfasilitasi penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan daerah	1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	7. Peningkatan iklim penanaman modal dan usaha	1. Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi 2. Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A 3. Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B
	8. Pemetaan kebutuhan dan pembangunan infrastruktur daerah dan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah	1. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 4. Program Pembangunan Fasilitas Umum 5. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman 6. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
	9. Melaksanakan pembangunan sesuai peruntukan ruang dan berkelanjutan	1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2. Perencanaan Lingkungan Hidup 3. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
D. Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK	1. Peningkatan jumlah dan mutu penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	1. Program Penelitian dan Pengembangan 2. Program Inovasi dan Pengembangan Teknologi 3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 4. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 6. Desiminasi Kelitbangan 7. Program Penyusunan Profil Calon

Agenda Strategis	Strategi	Program Prioritas
		Penerima Anugrah IPTEK
	2. Mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi dan Informasi melalui perencanaan dan pengembangan TIK guna menunjang akselerasi pembangunan daerah	1. Program Aplikasi Informatika 2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 3. Program Pengelolaan Arsip

Sumber : Hasil olah kuesioner dan FGD bersama pemangku kepentingan

Selanjutnya program-program prioritas ini akan dicapai dalam kurun waktu periode 2020 – 2025, sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6 Indikasi Program Prioritas Kelitbangan dan Tahun Pelaksanaan

No.	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS KELITBANGAN	TAHUN PELAKSANAAN				
		2021	2022	2023	2024	2025
A. Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
1	Program Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	√	√	√	√	√
3	Program Penguatan Maturitas SPIP	√	√	√	√	√
4	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	√	√	√	√	√
5	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	√	√	√	√	√
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√				
7	Program Prioritas Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	√	√	√	√	√
8	Pogram Pembinaan Perpustakaan	√	√	√	√	√
9	Program Pencegahan Bahaya Kebakaran			√		√
10	Program Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Non Kebakaran	√	√	√	√	√
11	Program Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	√	√	√	√	√
12	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	√	√	√	√	√
13	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√
14	Program Pemberdayaan Sosial	√	√	√	√	√
B. Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan						
1	Program Peningkatan mutu pendidikan dan Tenaga Kependidikan	√	√	√		
2	Program Perlindungan Khusus Anak	√				
3	Program Pemenuhan HAK Anak	√				
4	Program Pembinaan Keluarga Berencana	√	√	√	√	√
5	Program Pengelolaan Sistem Data	√	√	√	√	√

No.	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS KELITBANGAN	TAHUN PELAKSANAAN				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Gender dan Anak					
6	Program Pengembangan Kebudayaan	√	√	√	√	√
7	Pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	√	√	√	√	√
C. Program Prioritas Bidang Pembangunan ekonomi dan Pembangunan Daerah						
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	√	√	√	√	√
2	Program Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	√	√	√	√	√
3	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	√	√	√	√	√
5	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	√	√	√	√	√
6	Program Peningkatan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	√				
7	Program Pemasaran Pariwisata	√	√	√	√	√
8	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	√				
9	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	√				
10	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	√				
11	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	√	√	√	√	√
12	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	√	√	√	√	√
13	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	√	√	√	√	√
14	Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi	√	√	√	√	√
15	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A	√	√	√	√	√
16	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B	√	√	√	√	√
17	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	√	√	√	√	√
18	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	√	√	√	√	√
19	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	√	√	√	√	√
20	Program Pembangunan Fasilitas Umum	√	√	√	√	√
21	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	√				
22	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		√	√	√	√
23	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	√	√	√	√	√
24	Perencanaan Lingkungan Hidup	√				
25	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	√	√			
D. Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek						

No.	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS KELITBANGAN	TAHUN PELAKSANAAN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Program Penelitian dan Pengembangan	√	√	√	√	√
2	Program Inovasi dan Pengembangan Teknologi	√	√	√	√	√
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	√	√	√	√	√
4	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	√	√	√	√	√
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			√	√	
6	Desiminasi Kelitbangan	√	√	√	√	√
7	Penyusunan Profil Calon Penerima Anugrah IPTEK	√	√	√	√	√
8	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi			√		
9	Program Aplikasi Informatika	√	√			
10	Program Pengelolaan Arsip	√				

Sumber : Hasil olah kuesioner dan rekapitulasi FGD

Dari program prioritas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik memiliki 14 indikasi program prioritas melibatkan anggaran kelitbangan tahun 2021 mencapai Rp. 2.100.084,- tahun 2022 dengan anggaran Rp. 2.171.232,- Tahun 2023 dengan anggaran Rp. 2.294.870,- tahun 2024 anggaran direncanakan Rp. 2.262.370, - dan tahun 2025 rencana anggaran mencapai 2.315.000,-
- b) Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan memiliki 7 indikasi program prioritas dengan perencanaan anggaran tahun 2021 mencapai Rp. 16.080.246,-; tahun 2022 mencapai Rp. 17.717.176,-; tahun 2023 mencapai 16.842.720,-; tahun 2024 rencana anggaran mencapai Rp. 15.782.235,- dan tahun 2025 rencana anggaran mencapai Rp. 15.797.586,-
- c) Program Prioritas Bidang Pembangunan ekonomi dan Pembangunan Daerah dengan 25 indikasi Program Prioritas dengan perencanaan anggaran tahun 2021 dengan capaian anggaran Rp. 8.657.842,-; tahun 2022 capaian anggaran Rp. 9.271.081,-; tahun 2023 dengan capaian anggaran Rp. 9.093.917,-; tahun 2024 di rencanakan capaian anggaran Rp. 9.012.265,- dan tahun 2025 rencana capaian anggaran Rp. 9.097.265,-
- d) Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK dengan 10 indikasi program prioritas kelitbangan melibatkan anggaran sebagai berikut: tahun 2021 mencapai Rp. 4.639.750,-; tahun 2022 mencapai Rp. 3.870.968,-; tahun 2023 capaian anggaran Rp. 3.002.855,- tahun 2024 rencana anggaran mencapai Rp. 3.085.354,- dan tahun 2025 mencapai Rp. 3.464.389,-

Memperhatikan data di atas dalam perencanaan dan realisasi anggaran nampak terjadi fluktuasi pada setiap program prioritas kelitbangan, hal ini sesuai dengan kebutuhan skala prioritas rencana pembangunan daerah dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh OPD terkait dalam rangka mencapai strategi pembangunan daerah, yang melibatkan program/kegiatan kelitbangan. Rincian program dan kegiatan kelitbangan dapat disajikan dalam tabel 3.7. dibawah ini.

Tabel.3.7. Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Kabupaten Buleleng 2020 – 2025

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target					Rencana Pembiayaan (Rp. 000)					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025			
A	Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik									2.100.084	2.171.232	2.230.200	2.262.370	2.315.000		
1	Program Kepegawaian Daerah			0	0	0	2	2	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000			
a	Pengembangan/Penambahan Fitur Aplikasi Daftar hadir online Kabupaten Buleleng	Tersedianya Aplikasi Daftar hadir online Kabupaten Buleleng	Aplikasi	1	1	1	1	1	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	BKPSDM	Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi Umum, Inspektorat, BKPSDM, BPKPD, Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Organisasi	
b	Pengembangan/Penambahan Fitur Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai Kabupaten Buleleng	Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai Kabupaten Buleleng	Aplikasi	1	1	1	1	1	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	BKPSDM	Sekda, Asist. Adm Pemerintahan, Asist Adm Umum, Inspektorat, BKPSDM, BPKPD, Bappeda, Bag Hukum, Bag Organisasi	
2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kdh								75.930	109.707	147.000	114.700	126.170			
a	Reviu Laporan Keuangan	Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Opini auditor eksternal atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	93.200	102.520	102.600	102.620	102.700	Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng	SKPD	
b	Evaluasi Lakip SKPD dan Reviu Lakipda	Persentase SKPD yang telah ditetapkan ZI menuju WBK/WBBM	Persentase	95	97	97	97	97	11.600	12.760	13.500	13.550	13.600	Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng	SKPD	
c	Penilaian Zona Integritas	Persentase SKPD yang telah ditetapkan ZI menuju	Persentase	72	100	100	100	100	9.900	10.890	11.100	11.100	11.100	Inspektorat Daerah Kabupaten	SKPD	

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target					Rencana Pembiayaan (Rp. 000)					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**
		WBK/WBBM												Buleleng	
3	Program Penguatan Maturitas SPIP			100	100	100	100	100	15.800	17.380	7.500	7.800	18.100		
a	Bimbingan Teknis SPIP, Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Penyelenggaraan SPIP, Monitoring dan Evaluasi SPIP, laporan	Meningkatnya Level Maturitas SPIP, Persentase SKPD dengan maturitas SPIP minimal level 3	Persentase	100	100	100	100	100	15.800	17.380	17.500	17.800	18.100	Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng	SKPD
4	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan								316.780	348.458	351.200	352.800	353.500		
a	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Pengawasan, Level Kapabilitas APIP Kabupaten	Level	3	3	3	3	13	316.780	348.458	351.200	352.800	353.500	Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng	BPKP Perwakilan Provinsi Bali,
5	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			1	1	1	1	1	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
a	Kajian pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi publik	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Dokumen	1	1	1	1	1	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Dinas Kominfo sandi	Dinas PUPR, Setda Kab Buleleng
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1					75.000	-	-	-	-		
a	kajian DED Interior Kantor DiskominfoSanti	Memiliki dokumen Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah	Dokumen	1					75.000					Dinas Kominfo sandi	Dinas PUPR

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target					Rencana Pembiayaan (Rp. 000)					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**
	dan BCC	Gedung Kantor													
7	Program Prioritas Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan			3	3	3	3	3	17.200	18.060	19.100	19.200	19.500		
a	Kajian pengembangan Inovasi Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah jenis inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang telah dilaksanakan	jenis	3	3	3	3	3	17.200	18.060	19.100	19.200	19.500	Disdukcapil	Kecamatan dan Desa
8	Pogram Pembinaan Perpustakaan								400.000	450.000	450.000	500.000	500.000		
a	Indek Literasi Masyarakat	Tersedianya data indek literasi masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	DAPD	Balitbang
b	Pengembangan Perpustakaan Desa	Terbentuknya/Berkembangnya perpustakaan desa	Perpustakaan Desa	30	40	40	40	40	100.000	150.000	150.000	200.000	200.000	DAPD	Kec/Desa
c	Pengembangan perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Kelompok masyarakat yang menerapkan perpustakaan berbasis inklusi sosial	9 Ds/9 Kec. Klp.Masyarakat	9	9	9	9	9	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	DAPD	Kec/Desa
9	Program Pencegahan Bahaya Kebakaran			-	-	1		1	-	-	50.000	-	50.000		
a	Pendataan dan pemetaan daerah rawan kebakaran	terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Kebakaran sesuai dengan kajian resiko bahaya kebakaran	Laporan			1		1			50.000		50.000	Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran
10	Program Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Non Kebakaran			1	1	1	1	1	300.000	330.000	330.000	350.000	350.000		

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target					Rencana Pembiayaan (Rp. 000)					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**
a	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	Tahun	1	1	1	1	1	300.000	330.000	330.000	350.000	350.000	Dinas Pemadam Kebakaran	
11	Program Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			2	2	2	2	2	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
a	Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Inisiatif DPRD	Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD	Dokumen	2	2	2	2	2	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Sekretariat DPRD	OPD
12	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			10	10	10	10	10	205.604	226.164	230.200	240.300	241.500		
a	Program Penegasan Batas Daerah	Terwujudnya tertib administrasi Pemerintahan melalui kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas daerah	Dokumen	10	10	10	10	10	205.604	226.164	230.200	240.300	241.500	Bagian Pemerintahan Setda Buleleng	Bappeda, BPKPD, Badan Kesbangpol, DPMD, Bagian Hukum dan Seluruh Kecamatan
13	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			20	20	20	20	20	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
a	Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	Dokumen Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	Dokumen	20	20	20	20	20	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	Dinas Kesehatan	Puskesmas
14	Program Pemberdayaan Sosial				1	1	1	1		60.000	60.000	60.000	60.000		
a	Kajian Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat	Memiliki Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan	Dokumen		1	1	1	1		60.000	60.000	60.000	60.000	Dinsos	Disdikpora, Diskes, Bappeda, BPMD, Dsdukcapil

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target				Rencana Pembiayaan (Rp. 000)					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**
	Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) untuk penanganan PMKS.	Sosial (PUSKESOS) untuk penanganan PMKS.												
B	Program Prioritas Bidang Sosial dan Masyarakat							1.127.717	606.918	621.946	16.080.246	17.439.526		
1	Program Peningkatan mutu pendidikan dan Tenaga Kependidikan			1	1	1		1.645.701	1.954.942	1.060.485,5	-	-		
a	Pengembangan sekolah mercusuar/Lighthouse School Program.	Terciptanya sekolah model dengan guru yang berkualitas dan sistem manajemen sekolah yang unggul, hasil akhir dicapai tahun 2023	Kegiatan	1	1	1		1645701	1954941,5	1.060.485,5			Disdikpora	SMPN 8 Singaraja, PSF
2	Program Perlindungan Khusus Anak			9				30.000						
a	Kajian Ranperda TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di Kabupaten Buleleng	Persentase Lembaga penyedia layanan bagi Perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk P2TP2A yang sesuai dengan standar	Kecamatan	9				30.000					DP2KBP3A Kabupaten Buleleng	
3	Program Pemenuhan HAK Anak			2				50.000						
a	Kajian Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Buleleng	Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak	Dokumen	2				50.000					DP2KBP3A Kabupaten Buleleng	

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target					Rencana Pembiayaan (Rp. 000)					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**
4	Program Pembinaan Keluarga Berencana			1	1	1	1	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
a	Kajian kuantitas dan kualitas penduduk Kabupaten Buleleng	Meningkatnya Pembinaan kepersertaan KB di wilayah dan sasaran khusus	Dokumen	1	1	1	1	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	DP2KBP3A Kabupaten Buleleng	
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak			4	4	4	4	4	50.000	50.000	70.000	70.000	80.000		
a	Kajian Statistik Gender Kabupaten Buleleng	Meningkatnya kualitas informasi data gender dan anak	Dokumen	2	2	2	2	2	30.000	30.000	40.000	45.000	50.000	DP2KBP3A Kabupaten Buleleng	
b	Kajian Profil Anak Kabupaten Buleleng	Meningkatnya kualitas informasi data gender dan anak	Dokumen	2	2	2	2	2	20.000	20.000	30.000	25.000	30.000	DP2KBP3A Kabupaten Buleleng	
6	Program Pengembangan Kebudayaan			9	9	9	9	9	14.109.410	15.502.586	15.502.586	15.502.586	15.502.586		
a	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Fasilitasi dan Monev Hibah, Jumlah desa Adat yang dibina dan dilestarikan, jumlah pecalang yang dilatih, jumlah sekaa truna yang dibina dan dilestarikan, penyuratan awig-awig desa adat, penyuratan awig-awig sekaa truna	Paket Kegiatan	5	5	5	5	5	13.931.760	15.324.936	15.324.936	15.324.936	15.324.936	Disbud	DinKes, DinSos, DPMD,DLH, Dinas Perkimta, Bag Hukum Setda, & P2KBP3A
b	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Subak Abian yang dibina dan dilestarikan, Jumlah Subak yang dibina dan dilestarikan penyuratan awig-awig Subak, penyuratan	Paket Kegiatan	4	4	4	4	4	177.650,00	177.650,00	177.650,00	177.650,00	177.650,00	Disbud	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas PUPR,Kementrian Agama, Disperindagkop UKM

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target					Rencana Pembiayaan (Rp. 000)					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**
		awig-awig Subak Abian													
7	Pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya			14	14	14	14	14	145.135	159.649	159.649	159.649	165.000		
a	Register Cagar Budaya Yang Direkomendasi	Jumlah Cagar Budaya Yang Direkomendasi	Kegiatan	7	7	7	7	7	88.500	97.350	97.350	97.350	100.000	Disbud	
b	Register Cagar Budaya yang akan didaftarkan di Database	Jumlah Obyek yang diduga Cagar Budaya yang akan didaftarkan di Database	Kegiatan	7	7	7	7	7	56.635	62.299	62.299	62.299	65.000	Disbud	
C	Program Prioritas Bidang Pembangunan ekonomi dan Pembangunan Daerah								4.262.919	7.120.240	7.883.438	8.657.842	8.886.081		
1	Program Perekonomian dan Pembangunan			2	2	2	2	2	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
a	Pengendalian dan distribusi perekonomian	Terkoordinasinya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Dokumen	1	1	1	1	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Bagian Ekbang	Dinas Pertanian, DKPP, DisPar, DisdagprinKopUKM, PD, Pasar, BULOG, Polres Buleleng, BPS
b	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Tersusunnya Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Buleleng	Dokumen	1	1	1	1	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Bagian Ekbang	Dinas Pertanian, DKPP, DisPar, DisdagprinKopUKM, PD, Pasar, BULOG, Polres Buleleng, BPS
2	Program Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan			1	1	1	1	1	97.699	700.000	700.000	600.000	600.000		
a.	Monitoring dan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terbentuk dan berkembangnya kawasan baru.	Kawasan	1	1	1	1	1	97.699	700.000	700.000	600.000	600.000	Dinas PMD	Bappeda, Pariwisata dan PUTR
3	Program Peningkatan Kapasitas			1	1	1	1	1	49.999	50.000	50.000	50.000	50.000		

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target					Rencana Pembiayaan (Rp. 000)					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**
	Aparatur Pemerintahan Desa														
a	Pengkajian Pemekaran Banjar Dinas	Terwujudnya banjar dinas definitif	Banjar Dinas	1	1	1	1	1	49.999	50.000	50.000	50.000	50.000	Dinas PMD	desa terkait
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian			4	4	4	4	4	915.000	915.000	915.000	915.000	1.000.000		
a	Pengembangan benih unggul tanaman pangan	jumlah benih unggul tanaman pangan	Paket	1	1	1	1	1	150.000	150.000	150.000	150.000	200.000	Distan	Batan
b	Pengembangan benih unggul tanaman hortikultura	Jumlah benih unggul tanaman hortikultura	Paket	1	1	1	1	1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Distan	
c	Pengembangan benih unggul perkebunan	Jumlah benih unggul perkebunan	Paket	1	1	1	1	1	565.000	565.000	565.000	565.000	600.000	Distan	
d	Pelestarian SDG Hewan	Jumlah pelestarian SDG Hewan	Paket	1	1	1	1	1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Distan	
5	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata								300.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
a	Kajian Pengembangan Kawasan Desa Pariwisata	Jumlah yang mengembangkan Kawasan Desa Pariwisata	Desa	20	20	20	20	20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Kec.Seririt	Dinas Pariwisata
b	Pengembangan Agro Wisata di Wilayah Kecamatan Busungbiu	Jumlah Desa yang berkembang agro wisatanya	Desa	15	15	15	15	15	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Kecamatan Busungbiu	Dispar
6	Program Peningkatan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			1					50.000						

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target					Rencana Pembiayaan (Rp. 000)					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**
a	Penyusunan Kajian pengembangan wisata heritage perkotaan singaraja	Jumlah kajian pengembangan wisata heritage perkotaan singaraja	Dokumen	1					50.000					Dinas Pariwisata	Dinas PERKIMTA
7	Program Pemasaran Pariwisata			1	1	1	1	1	43.080	45.300	45.300	50.000	50.000		
a	Penyusunan Kajian analisa pasar pariwisata Kabupaten Buleleng	Jumlah kajian analisa pasar pariwisata Kabupaten Buleleng	Dokumen	1	1	1	1	1	43.080	45.300	45.300	50.000	50.000	Dinas Pariwisata	BPKPD, Bappeda
8	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri								80.000						
a	Kajian Teknis Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten	Berkembangnya produk unggulan daerah	Dokumen	1					70.000					Disdagprink opUKM	
b	Pengembangan Buleleng Directoy Bisnis	Berkembangnya produk unggulan daerah.	Orang	5					10.000					Disdagprink opUKM	
9	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			5					280.203						
a	Percontohan Budidaya Air Tawar	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Paket	5					280.203					DKPP	DKPP
10	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			5					535.497						
a	Pengembangan Saprasi Perikanan Tangkap	Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Paket	5					535.497					DKPP	DKPP

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target					Rencana Pembiayaan (Rp. 000)					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**
11	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat								264.000	265.000	275.000	275.000	275.000		
a	Pekarangan Pangan Lestari	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Paket	10	10	15	15	15	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000	DKPP	DKPP
b	Gelar Pangan Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kegiatan	8	8	8	8	8	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	DKPP	DKPP
c	Peningkatan produksi pangan lokal	Meningkatkan produksi pangan lokal	Desa/Kelurahan	21	21	21	21	21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Kec.Seririt	DKP
d	Penerapan Teknologi Pengolahan Garam Viramide	Pengolahan Garam Viramide di Wilayah Kecamatan	KG,Desa Pemuteran	5	5	5	5	5	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Kecamatan Gerokgak	DKP
12	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan			1	1	1	1	1	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
a	Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN)	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kot a	Kegiatan	1	1	1	1	1	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	DKPP	DKPP
13	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya								105.000	105.000	105.000	110.000	110.000		

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target					Rencana Pembiayaan (Rp. 000)					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**
a	Optimalisasi potensi kelautan dan perikanan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Paket	1	1	1	1	1	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	DKPP	DKPP
b	<i>Optimalisasi potensi kelautan dan perikanan</i>	Jumlah Desa yang mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan	Desa/Kelurahan	9	9	9	9	9	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Kec.Seririt	DKPP
14	Program Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi								1.187.032	1.310.867	1.310.867	1.310.867	1.310.867		
a	Penyusunan sistem informasi penanaman modal	Jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun dan di upgrade	Sistem	2	2	2	2	2	280.000	305.000	305.000	305.000	305.000	DPMPTSP	
b	Kajian kebijakan penanaman modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000	DPMPTSP	
c	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi LKPM yang disusun	Dokumen	4	4	4	4	4	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	DPMPTSP	
d	Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pengusaha yang paham dengan laporan kegiatan penanaman modal(LKPM)	Pengusaha	100	100	100	100	100	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000	DPMPTSP	
e	Penyusunan perencanaan penanaman modal	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun	Dokumen	3	3	3	3	3	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000	DPMPTSP	
f	Penyelesaian permasalahan	Jumlah kasus yang difasilitasi	Kasus	5	5	5	5	5	68.438	75.431	75.431	75.431	75.431	DPMPTSP	

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target					Rencana Pembiayaan (Rp. 000)					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**
	penanaman modal														
g	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Dokumen	1	1	1	1	1	221.974	247.260	247.260	247.260	247.260	DPMPTSP	
h	Penyusunan profil investasi	Jumlah dokumen profil investasi yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	16.620	13.176	13.176	13.176	13.176	DPMPTSP	
15	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang A			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	506.620	803.176	803.176	810.000	810.000		
a	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A I,II pada Sector Pekerjaan Umum,Perhubungan Komunikasi dan Informatika,serta Ijin Lokasi IMB,Ijin Prinsip,HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Jumlah permohonan izin sektor Pekerjaan Umum,Perhubungan Komunikasi dan Informatika,serta Ijin Lokasi IMB,Ijin Prinsip,HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Izin	2500	2500	2500	2500	2500	270.000	560.000	560.000	560.000	560.000	DPMPTSP	PU, KOMINFO, BAPPEDA, BPN, HUKUM, PARIWISATA
b	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A III pada Sector Pertanian,Perikanan ,dan Ijin IUJK,Reklama	Jumlah permohonan izin sektor Pertanian,Perikanan,dan Ijin IUJK,Reklama yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Izin	500	500	500	500	500	236.620	243.176	243.176	250.000	250.000	DPMPTSP	HUKUM, EKBANG, PU, BAPPEDA, PERIKANAN, DISNAKER
16	Program Penyelenggaraan Peningkatan			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	686.620	613.176	623.176	625.000	625.000		

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target					Rencana Pembiayaan (Rp. 000)					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B														
a	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I,II pada Sector Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan	Jumlah permohonan izin sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Izin	1500	1500	1500	1500	1500	450.000	370.000	380.000	380.000	380.000	DPMPTSP	
b	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B III pada Sector Pariwisata dan Kesehatan	Jumlah permohonan izin sektor Pariwisata dan Kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	Izin	1500	1500	1500	1500	1500	236.620	243.176	243.176	245.000	245.000	DPMPTSP	
17	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Terpenuhinya Database Kondisi Jalan dan Jembatan	%	100	100	100	100	100	206.383	225.228	225.228	225.228	225.228		
a	Inspeksi Kondisi Jalan	Tersedianya Database kondisi Jalan	%	100	100	100	100	100	206.383	225.228	225.228	225.228	225.228	DPUTR	
18	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	%	100	100	100	100	100	240.156	252.164	255.000	255.000	255.000		
a	Kegiatan Perencanaan Pembangunan, Peningkatan, Operasi, dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Tersedianya perencanaan pengelolaan Sumber Daya Air	%	100	100	100	100	100	240.156	252.164	255.000	255.000	255.000	PUTR	

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target					Rencana Pembiayaan (Rp. 000)					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**
19	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	%	100	100	100	100	100	467.884	515.870	515.870	515.870	515.870		
a	Kegiatan Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum	Tersedianya perencanaan SPAM	%	100	100	100	100	100	467.884	515.870	515.870	515.870	515.870	PUTR	
20	Program Pembangunan Fasilitas Umum	Meningkatnya kondisi Fasilitas Umum	%						2.052.668	2.155.300	2.155.300	2.155.300	2.155.300		
a	Pendampingan Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	Tersedianya Perencanaan Pembangunan Gedung Negara	%	100	100	100	100	100	33.282	34.946	34.946	34.946	34.946	DPUTR	
b	Penyusunan Regulasi Pemanfaatan tata ruang	Meningkatnya Regulasi Pemanfaatan Ruang	%	67,5	80	80	90	100	1.009.693	1.060.177	1.060.177	1.060.177	1.060.177	DPUTR	
c	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Tersusunnya Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan	%	55	60	60	80	80	624.693	655.927	655.927	655.927	655.927	DPUTR	
d	Revisi rencana tata ruang	Terkoreksinya Rencana Tata Ruang	%	80	100	100	100	100	385.000,00	404.250	404.250	404.250	404.250	DPUTR	
21	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman			1					75.000						
a	Legalisasi naskah adakademis ranperda RP3KP	Terlegalisasinya Ranperda RP3KP	Dokumen	1					75.000					disperkimta	Disperkimta
22	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			2	2	2	2	2	-	450.000	450.000	450.000	450.000		
a	Tatanan Transportasi Lokal Kabupaten	Peningkatan Kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Dokumen					1					350.000	Dishub	

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target				Rencana Pembiayaan (Rp. 000)						Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**
	Buleleng	untuk pemenuhan pelayanan publik.													
b	Kajian Trayek Angkutan Perkotaan Kabupaten Buleleng	Peningkatan Kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik.	Dokumen				1					100.000		Dishub	
c	Transportasi Dalam Angka Kabupaten Buleleng	Peningkatan Kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik.	Dokumen				1					350.000		Dishub	Balitbang
d	Kajian Trayek Angkutan Perdesaan Kabupaten Buleleng	Peningkatan Kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik.	Dokumen				1					100.000		Dishub	Balitbang
e	Master Plan Pengembangan Intelligent Transport System (ITS) di Kabupaten Buleleng	Peningkatan Kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik.	Dokumen				1				350.000			Dishub	Balitbang
f	Kajian jaringan lintas angkutan barang Kabupaten Buleleng	Peningkatan Kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik.	Dokumen				1				100.000			Dishub	Balitbang
g	Rencana Induk jaringan	Peningkatan Kuantitas dan kualitas	Dokumen		1	1				350.000				Dishub	Balitbang

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target					Rencana Pembiayaan (Rp. 000)					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**
	Transportasi jalan Kab. Buleleng	infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik.													
h	DED Pembangunan Area Traffic Control System di Kabupaten Buleleng	Peningkatan Kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik.	Dokumen		1	1				100.000					Dishub Balitbang
23	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			4	4	4	4	4	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
a	Jasa konsultasi penelitian pengukuran kualitas air, udara ambien dan tanah	Jumlah Data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas air, udara dan Tanah tersedia	Dokumen	3	3	3	3	3	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	DLH	DLH
b	Jasa konsultasi penentuan kelas air di Tukad Buleleng	Jumlah dokumen penentuan kelas air	Dokumen	1	1	1	1	1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	DLH	DLH
24	Perencanaan Lingkungan Hidup			2					100.000						
a	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten Buleleng	Jumlah dokumen Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten Buleleng	Dokumen	2					100.000					DLH	DLH
25	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati								100.000	200.000					
a	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen penetapan pengelolaan keanekaragaman hayati	Dokumen	1					100.000					DLH	DLH
b	Kajian Pengelolaan	Luas RTH Kawasan	Ha		73,77					200.000				DLH	DLH

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target					Rencana Pembiayaan (Rp. 000)					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**
	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Perkotaan yang ditata dan dipelihara dalam kondisi baik													
D	Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK									4.639.750	3.870.968	3.002.855	3.085.354	3.464.389	
									2.348.952	2.510.286	1.972.661	2.065.641	2.324.705		
a	Fasilitasi Pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi	Tersusunnya dokumen fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	80.260	-	-	Balitbang	BPKPD dan SKPD terkait
b	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Tersusunnya dokumen Penyusunan Naskah Akademik Perubahan Perda No 3 Tahun 2008	Dokumen	-	-	-	-	1	-	50.000				Balitbang	Bagian Pemerintahan Setda Buleleng
c	Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	Tersusunnya dokumen fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	Dokumen	1	-	-			-	62.376				Balitbang	Bagian Organisasi dan SKPD pengampu Perda
d	Fasilitasi, Pelaksanaan dan evaluasi penelitian	Tersusunnya dokumen fasilitasi pelaksanaan dan	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	90.000	-	Balitbang	BPKPD dan Pemdes dan SKPD terkait

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target				Rencana Pembiayaan (Rp. 000)						Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**
	dan pengembangan bidang aparatur desa	evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur desa													
e	Sub Kegiatan : Fasilitasi, Pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan	Tersusunnya dokumen fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	95.000	Balitbang	BPKPD dan Bagian Organisasi dan SKPD terkait
f	Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat	Tersusunnya dokumen fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat	Dokumen	-	1	1			-	68.613				Balitbang	Badan Kesbangpol
g	Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK)	Tersusunnya RINDUK dan Evaluasi	Dokumen	1	1	1	1	1	5.000	90.000	10.000	15.000	20.000	Balitbang	seluruh SKPD
h	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Tersusunnya dokumen penelitian dan pengembangan bidang kesehatan	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	90.000	-	-	Balitbang	Dinas kesehatan
i	Penelitian dan Pengembangan aspek aspek sosial	Tersusunnya dokumen penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek	Dokumen	-	-	-	1	1	-	-	-	90.000	95.000	Balitbang	Dinas Sosial dan SKPD terkait

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target				Rencana Pembiayaan (Rp. 000)						Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**
		sosial													
j	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tersusunnya dokumen penelitian dan pengembangan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	90.000	-	Balitbang	Dinas P2KBP3A
k	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi masyarakat	Tersusunnya dokumen penelitian dan pengembangan bidang partisipasi Masyarakat	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	90.000	-	-	Balitbang	Dinas PMD
l	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Tersusunnya dokumen Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	-	-			86.664	-				Balitbang	Dinas Pariwisata dan SKPD terkait
m	Penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	Tersusunnya dokumen penelitian dan pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan	Dokumen	-	1	-	-	-	-	88.000				Balitbang	Dinas Pendidikan , Dinas Kebudayaan dan SKPD terkait
n	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Tersusunnya dokumen penelitian dan pengembangan bidang kepemudaan dan olahraga	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	95.000		Balitbang	Disdikpora dan SKPD terkait
o	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan	Tersusunnya Penelitian dan Pengembangan Administrasi	Dokumen	1	-	-			64.032	-				Balitbang	Dinas Dukcapil, Pemerintah Desa dan SKPD

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target				Rencana Pembiayaan (Rp. 000)						Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**
	Pencatatan Sipil	Kependudukan dan Pencatatan Sipil													terkait
p	Penelitian dan Pengembangan tenaga kerja	Dokumen penelitian dan Pengembangan tenaga kerja	Dokumen	-	1				-	88.000				Balitbang	Dinas Naker, Dinas Dukcapil, Pemerintah Desa dan SKPD terkait
q	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	dokumen	1			1		73.232			70.000		Balitbang	Disdagprinkop dan UKM
r	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Laporan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	dokumen		1	1				80.553	70.000			Balitbang	Disdagprinkop dan UKM, DPMPTSP
s	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Laporan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	dokumen					1					70.000	Balitbang	Disdagprinkop dan UKM, BUMD
t	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Laporan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	dokumen		1		1			70.000		70.000		Balitbang	Dinas Lingkungan Hidup
u	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Laporan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	dokumen	1		1			72.128		70.000			Balitbang	Dinas Pertanian, dan DKPP serta SKPD terkait.
v	Penelitian dan Pengembangan	Laporan Penelitian dan Pengembangan	dokumen					1						Balitbang	DKPP serta

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target					Rencana Pembiayaan (Rp. 000)					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**
	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan											70.000		SKPD Terkait
w	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan Pekerjaan Umum	dokumen		1		1			70.000		70.000		Balitbang	Dinas PUTR, Bappeda, Bagian Hukum
x	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	terlaksananya penelitian dan pengembangan perhubungan	Dokumen	1	-	-			72.680					Balitbang	Bappeda, Dishub, DPUTR
2	Program Inovasi dan Pengembangan Teknologi								1.125.216	1.022.744	785.194	834.713	944.684		
a	Inovasi dan Pengembangan Teknologi	Tersusunnya dokumen penelitian inovasi dan teknologi	Dokumen	1	1	1			325.000	345.000	350.000	360.000	370.000	Balitbang	Balitbang dan seluruh SKPD se-Kabupaten Buleleng
b	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen			1	1	1			37.208	40.928	45.021	Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng	Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
c	Fasilitasi Inovasi Kepala Daerah	Inovasi Kepala Daerah	Dokumen	1	1	1			100.000	100.000	120.000	130.000	130.000	Balitbang	Balitbang dan seluruh SKPD se-Kabupaten Buleleng

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target				Rencana Pembiayaan (Rp. 000)					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**	
d	Fasilitasi Inovasi SKPD	Inovasi SKPD	Dokumen	1	1	1			75.000	80.000	90.000	100.000	110.000	Balitbang	Balitbang dan seluruh SKPD se-Kabupaten Buleleng
e	Fasilitasi Inovasi Komunitas/Kelompok	Inovasi Komunitas/Kelompok	Dokumen	1	1	1			50.000	55.000	60.000	65.000	70.000	Balitbang	Balitbang dan seluruh SKPD se-Kabupaten Buleleng
f	Fasilitasi Inovasi Masyarakat	Inovasi Masyarakat	Dokumen	1	1	1			50.000	55.000	60.000	65.000	70.000	Balitbang	Balitbang dan seluruh SKPD se-Kabupaten Buleleng
g	Penyusunan kajian Pengembangan Teknologi	Kajian Pengembangan Teknologi	Dokumen	1	1	1			50.000	55.000	60.000	65.000	70.000	Balitbang	Balitbang dan seluruh SKPD se-Kabupaten Buleleng
h	Naskah Akademis Revisi RTRW Kabupaten Buleleng	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	dokumen	1					50.000					Balitbang	Bappeda, DPUTR, Bagian Hukum Setda
i	Naskah Akademis RDTR Kawasan Perkotaan Celukan Bawang	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	dokumen	1					50.000					Balitbang	Bappeda, DPUTR, Bagian Hukum Setda
j	Naskah Akademis RDTR Kawasan Perkotaan Gerokgak	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	dokumen	1					50.000					Balitbang	Bappeda, Dinas Perkimta, Dinas PUTR, Bagian Hukum Setda

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target				Rencana Pembiayaan (Rp. 000)					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**	
k	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan :	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	dokumen					1					70.000	Balitbang	Dinas PUTR, Bappeda, Bagian Hukum
l	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	dokumen	1					50.000					Balitbang	Dinas Perkimta, Bappeda, Bagian Hukum
m	Naskah Akademis Pengelolaan Air Limbah	Memiliki dokumen Naskah Akademis Pengelolaan Air Limbah	Dokumen		1	1				50.000				Balitbang	Dinas Perkimta, Bappeda, Bagian Hukum
n	Penyusunan Kajian Pemetaan Data Base Rawan Bencana Kabupaten Buleleng	Tersusunnya dokumen fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat	Dokumen		1	1			-	80.000				Balitbang	Badan Kesbangpol
o	Pengkajian terhadap pemetaan data base Daerah Rawan Konflik Kabupaten Buleleng	Jumlah dokumen/buku Pengkajian terhadap pemetaan data base Daerah Rawan Konflik Kabupaten Buleleng	Dokumen/buku	1	-	-			62.376	-				Balitbang	Dinas BPBD

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target					Rencana Pembiayaan (Rp. 000)					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**
p	Kajian Profil Kemiskinan Daerah Kabupaten Buleleng	Memiliki profil kemiskinan daerah	Dokumen	-	-	-			-	100.000				Balitbang	Bappeda
q	Fasilitasi penerapan inovasi	Inovasi SKPD dan masyarakat	Dokumen	1	1	1			57.040	62.744				Balitbang	Balitbang dan seluruh SKPD se-Kabupaten Buleleng
r	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dokumen			1	1	1			7.986	8.785	9.663	Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng	Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
s	Pengembangan Basis Data Kependudukan di Kecamatan Buleleng	Terselenggaranya pelayanan masyarakat yang optimal	Desa/Kelurahan	17	-	-			40.800	-				Kecamatan Buleleng	KominfoSandi
t	Pengembangan Program Layanan Lelang dan Pengelolaan Dokumen Pengadaan	Tercapainya sistem pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kondisi dan perkembangan terbaru yang dapat dimanfaatkan pelaku pengadaan barang dan jasa	LPSE	1					30.000					Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh SKPD Kabupaten Buleleng
u	Pengembangan layanan kecamatan	Terealisasi pelayanan kecamatan Sukasada yang efisien	Kegiatan	1	1	1			50.000	20.000				Kecamatan Sukasada	KominfoSandiD PMPTSP,Disdu

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target					Rencana Pembiayaan (Rp. 000)					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**	
	berbasis online	dan terkomputerisasi													kcapail	
v	Pengembangan E-Office Kecamatan Sukasada	Terealisasinya Sistem Informasi Kecamatan Sukasada yang efisien dan terkomputerisasi	Kegiatan	1	1	1			35.000	20.000					Kecamatan Sukasada	Kominfoandi, BPKPD, DAPD
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			4	4	4	4	4	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
a	Kaji terap budidaya nila sistem minapadi	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi,serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Paket	1	1	1	1	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	DKPP	DKPP	
b	Kaji Terap pembenihan Nila		Paket	1	1	1	1	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	DKPP	DKPP	
c	Pelatihan pendederan nila		Paket	1	1	1	1	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	DKPP	DKPP	
d	Penyiapan dan penyebaran informasi teknologi perikanan		Paket	1	1	1	1	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	DKPP	DKPP	
4	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat								15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
a	Pelatihan Pangan	Pemberdayaan Masyarakat dalam	Kegiatan						15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	DKPP	DKPP	

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target					Rencana Pembiayaan (Rp. 000)					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**
	Lokal Non Beras	Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis SumberDaya Lokal		10	10	10	10	10							
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya								50.000	-	-	-	-		
a	Evaluasi PERDA Retribusi Perijinan Perikanan	memiliki dokumuen hasil evaluasi terhadap retribusi perijinan perikanan	Dokumen	1					50.000		-			DKPP	DKPP
6	Desiminasi Kelitbangan								50.000	55.000	60.000	65.000	70.000		
a	Diseminasi hasil kelitbangan	Tersosialisasinya hasil kelitbangan	Dokumen	9	12	12	12	12	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000	Balitbang	Balitbang dan seluruh SKPD se-Kabupaten Buleleng
7	Penyusunan Profil Calon Penerima Anugrah IPTEK								135.582	147.938	60.000	65.000	70.000		
a	Menyusun Profil Inovasi Daerah	buku profil calon penerima anugrah iptek;	Buku	100	100	100			12.140	12.140				Balitbang	Seluruh SKPD se-Kabupaten Buleleng
b	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Terwujudnya Hak Kekayaan Intelektual	Dokumen	1	1	1	1	1	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000	Balitbang	Seluruh SKPD se-Kabupaten Buleleng
c	Menyusun Laporan	Laporan IDSD	Dokumen	1	1	1			36.721	40.399				Balitbang	Seluruh SKPD se-Kabupaten

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target				Rencana Pembiayaan (Rp. 000)					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**
	IDSD													Buleleng
d	Menyusun Laporan IGA	Laporan IGA	Dokumen	1	1	1		36.721	40.399				Balitbang	Seluruh SKPD se-Kabupaten Buleleng
8	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi					1				70.000				
a	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen			1				70.000			Balitbang	Dinas Kominfo, Bappeda, Bagian Hukum
9	Program Aplikasi Informatika			2	1			425.000	80.000					
a	Kajian Peta Rencana dan Arsitektur Pengembangan SPBE Kabupaten Buleleng Tahun 2021 - 2025	Memiliki sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	1				350.000					Dinas Kominfo sandi	Bappeda, Balitbang Inovda
b	Kajian sistem informasi dan integrasi sistem	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Dokumen	1	1			75.000	80.000				Dinas Kominfo sandi	Bappeda, Balitbang Inovda
10	Program Pengelolaan Arsip							450.000	-	-	-	-		

No	Program Prioritas/Kegiatan Kelitbangan	Sasaran/outcome/ indikator	(Satuan, Kegiatan, Desa, Dokumen)	Target				Rencana Pembiayaan (Rp. 000)					Instansi Pelaksana	Instansi Terkait**	
a	Pengkajian Sarana prasarana Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)	Jumlah Sarana prasarana pendukung SIKD (Server beserta kelengkapannya)	Paket	1	-	-			300.000	-	-			DAPD	Kominfo santi
b	Kajian Akademis inovasi Bank Data Arsip Statis (BADAS)	Dokumen Bank Data Arsip Statis (BADAS)	Paket	1	-	-			150.000	-	-			DAPD	Balitbang

Sumber data : Survey Pelaksana Kelitbangan dan FGD

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN

Berdasarkan pada strategi kelitbangan daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, berikut diuraikan dan dijelaskan terkait dengan strategi pelaksanaan rencana kelitbangan kabupaten Buleleng yang dipilah menjadi empat bagian, yaitu kelembagaan, koordinasi pelaksanaan, kerjasama dan sinergitas dan evaluasi pelaksanaan.

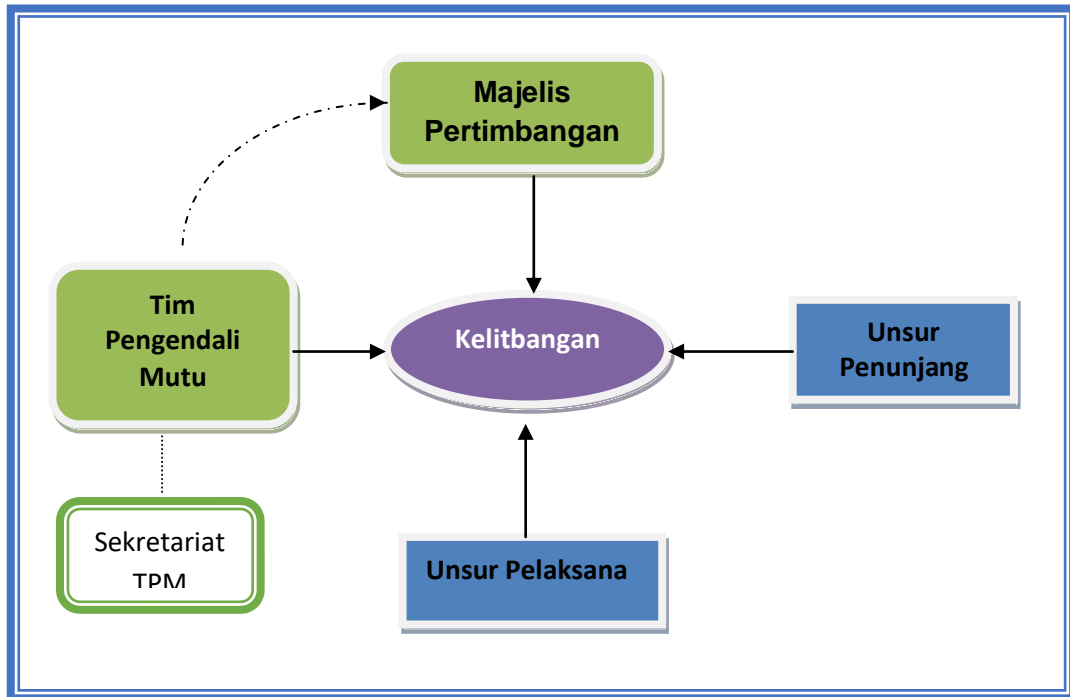
4.1. Kelembagaan

Kelembagaan kelitbangan secara garis besar dibagi menjadi empat komponen, yaitu : i) Majelis Pertimbangan (MP), ii) Tim Pengendali Mutu (TPM), iii) sekretariat TPM, dan iv) Tim Kelitbangan (TK). Tim Kelitbangan dibagi atas dua unsur, yaitu: unsur pelaksana, dan unsur penunjang.

Majelis pertimbangan diketuai oleh Bupati bertugas untuk 1) memberikan arah kebijakan umum kelitbangan, 2) memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan dan memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan. Dalam melaksanakan tugasnya majelis pertimbangan, sekurang-kurangnya melaksanakan sidang setahun sekali, untuk menetapkan rencana kelitbangan, baik dalam menyusun rencana induk, maupun rencana kerja tahunan.

Tim Pengendali Mutu (TPM) diketuai oleh Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, memiliki tugas dan tanggungjawab, yaitu 1) memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan, 2) melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan, 3) memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan, dan melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada Majelis Pertimbangan. TPM didukung dengan sekretariat TPM, yang bertugas membantu tugas-tugas TPM, dalam melaksanakan tugas.

Tim Kelitbangan (TK) terdiri dari unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur Pelaksana yang diketuai oleh Ketua Pusat Penelitian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ganesha Singaraja, Memiliki tugas, yaitu: a) melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan, b) memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keaslian, dan melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Sedangkan Unsur penunjang mempunyai tugas: a) memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan, b) memberikan pelayanan administrasi dan manajerial, bantuan dan dorongan demi kelancaran kelitbangan, c) menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan, dan melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Hubungan antar kelembagaan kelitbangan Kabupaten Buleleng dapat digambarkan pada gambar berikut ini.



Gambar 4.1. Bagan Kelembagaan Kelitbangan Kabupaten Buleleng

4.1.1. Koordinasi Pelaksanaan

Keseluruhan komponen kelembagaan meliputi MP (majelis Pertimbangan), TPM (Tim Pengendali Mutu), Sekretariat TPM dan Tim Kelitbangan (TK), sekurang-kurangnya melaksanakan sidang setahun sekali, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini dimaksudkan agar Majelis Pertimbangan dapat memberikan arah dan kebijakan umum kepada pelaksana kelitbangan dan pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana tahunan kelitbangan.

Tim Pengendali Mutu (TPM) dapat melaksanakan koordinasi minimal setahun 2 (dua) kali, guna memberikan penilaian dan pengendalian, dengan melibatkan sekretariat TPM, dan pelaksana kelitbangan, yang dapat dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir tahun. Sedangkan Tim Pelaksana dan unsur penunjang dapat melaksanakan koordinasi masing-masing sesuai dengan kebutuhan, dan permintaan pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan tugas kelitbangan.

4.1.2. Keterlibatan Institusi Kelitbangan

Salah satu arah kebijakan kelitbangan adalah meningkatkan jaringan sistem dan mekanisme kerja sama sebagai bagian dari pengembangan pelayanan pembangunan, dan perlindungan kepada masyarakat. Strategi yang dilaksanakan untuk mewujudkan kebijakan ini adalah mendorong terwujudnya kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kelitbangan dengan berbagai lembaga/institusi kelitbangan. Kegiatan ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

- 1) Sosialisasi rencana dan prioritas pengembangan kelitbangan Balitbang Kabupaten Buleleng, dari berbagai level organisasi pemerintahan dan kelembagaan riset yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng, kalangan perguruan tinggi, perusahaan, swasta dan organisasi kemasyarakatan.
- 2) Membangun kesepahaman dan pola kerjasama antar lembaga balitbang, dengan OPD lainnya, perguruan tinggi, dan pihak swasta, terkait dengan konsorsium riset daerah.

- 3) Mengembangkan skema insentif dan dukungan anggaran bagi pelaksanaan penelitian dan pengembangan, bagi pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kelitbangan yang mendukung pembangunan dan kebijakan daerah.
- 4) Mendorong kegiatan kelitbangan yang menunjang peningkatan produksi dan daya saing daerah berbasis Iptek, di wilayah Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan uraian di atas dapat diidentifikasi beberapa pemangku kepentingan yang akan dilibatkan dalam kegiatan kelitbangan di Kabupaten Buleleng adalah Kementerian Lembaga (K/L), khususnya terkait dengan Kelitbangan, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset Independen, Swasta, LSM dan juga Pelaku UMKM.

4.1.3. Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan

Bentuk kerjasama dan sinergitas yang diharapkan antara balitbang dengan berbagai pemangku kepentingan adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Kelembagaan (K/L), Pemerintah Provinsi dapat memberikan peran dan bentuk kerjasama yang diharapkan adalah :
 - ✓ Penguatan dibidang Program Kelitbangan Daerah
 - ✓ Memberikan fasilitasi sarana prasarana kelitbangan
 - ✓ Menyediakan dan pemanfaatan ruang kelitbangan
 - ✓ Memberi dukungan pengembangan fasilitas kelitbangan daerah
 - ✓ Pemenuhan tenaga fungsional dibidang kelitbangan
 - ✓ Peningkatan sumberdaya kelitbangan daerah.
2. Perguruan Tinggi/Lembaga Riset Independen dapat memberi kontribusi :
 - ✓ Kerjasama dalam kegiatan kelitbangan pada bidang sesuai dengan permendagri No. 17 Tahun 2016.
 - ✓ Pemanfaatan hasil Pengembangan IPTEK dalam mendukung kelitbangan di daerah.
 - ✓ Pemanfaatan fasilitas dan sumberdaya perguruan tinggi terkait dengan Kelitbangan
 - ✓ Peningkatan sumberdaya manusia kelitbangan.
3. Perusahaan Swasta/ UMKM :
 - ✓ Kerjasama dalam kegiatan kelitbangan pada bidang sesuai dengan permendagri No. 17 Tahun 2016.
 - ✓ Membentuk inkubasi bisnis bagi usahawan muda melalui kegiatan kelitbangan.
 - ✓ Mendukung kegiatan pameran, lomba dan inovasi daerah.
 - ✓ Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan.
4. LSM atau pemangku kepentingan lainnya :
 - ✓ Ikut berpartisipasi dalam sosialisasi program kelitbangan.
 - ✓ Terlibat aktif dalam menyediakan data dan informasi kelitbangan.
 - ✓ Memberikan masukan-masukan inovatif berbasis teknologi informasi, berkaitan dengan program inovasi daerah.

Perencanaan pembangunan di daerah sudah menggunakan pendekatan partisipatif, melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, selain berfungsi menggali seluruh potensi dan permasalahan pembangunan, juga dapat berfungsi untuk melaksanakan sinergitas proses pembangunan di

daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perlu mengintegrasikan Rencana Kerja Kelitbangan, baik Rencana Induk Kelitbangan maupun Rencana Kerja Tahunan. Dengan Demikian Program-program pembangunan di daerah berbasis pada hasil kelitbangan yang merupakan proses sinergitas dari berbagai pemangku kepentingan yang ada di daerah.

4.2. Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi hasil kelitbangan dilaksanakan dalam bentuk penilaian dan pengendalian yang dilakukan oleh Tim Pengendali Mutu sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun. Adapun komponen-komponen yang dinilai oleh TPM adalah:

- 1) Penjabaran RINDUK dalam Rencana Kerja Tahunan kelitbangan;
- 2) Pelaksanaan rencana kerja kelitbangan;
- 3) Pencapaian output dari RINDUK dan Rencana Kerja Kelitbangan;
- 4) Keterlibatan kerjasama dan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program kerja kelitbangan;
- 5) Tindak lanjut dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan;
- 6) Pemenuhan kualitas sumberdaya dan sarana prasarana kelitbangan; dan .
- 7) Dan hal-hal lain yang dipandang perlu, sesuai dengan hasil keputusan TPM.

Evaluasi pertengahan tahun, ditujukan sebagai langkah monitoring dan pengendalian, upaya memberikan motivasi serta peringatan, tentang pencapaian hasil kelitbangan. Sedangkan evaluasi akhir tahun ditujukan untuk menilai hasil kelitbangan keseluruhan, sebagai landasan rencana kerja tahun berikutnya, dan peningkatan kualitas kelitbangan di tahun berikutnya, serta merangkum dan menyusun laporan hasil penilaian dan evaluasi secara menyeluruh program kelitbangan satu tahun.

Evaluasi juga dapat dilakukan secara langsung dan partisipatif oleh pemangku kepentingan, dari setiap proses yang dilaksanakan dalam program kelitbangan. Kegiatan evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui kepastian pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai, dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan hasil dan perencanaan di masa yang akan datang.

Untuk mempermudah dalam penilaian maka diperlukan indikator kinerja kunci pelaksanaan kelitbangan, yang dapat dilaksanakan evaluasi setiap tahun.

Tabel 4.1. Indikator Kunci Kinerja Pelaksanaan Kelitbangan

NO	INDIKATOR KUNCI	TARGET KINERJA (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tingkat Penjabaran dari Rencana Induk ke Dalam Rencana Kerja Tahunan					
	Persentase tema prioritas pertahun yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahunan	50%	50%	50%	50%	50%
2	Tingkat Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan					
	Persentase Rencana Kerja Tahunan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan dalam RKPD	80%	80%	80%	80%	80%

3	Tingkat Ketercapaian output dari Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Induk					
a	Persentase ketercapaian output dari tema prioritas pada Rencana Induk	50%	50%	50%	50%	50%
B	Presentase ketercapaian output dari kegiatan pada Rencana Kerja Tahunan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tingkat keterlibatan dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kelitbangan					
a	Jumlah pertahun pihak yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam kegiatan kelitbangan, tahapan rekayasa, pengoperasian dan penerapan	3	3	3	3	3
b	Jumlah kegiatan penelitian yang didanai dari biaya non APBD pertahun di Kabupaten Buleleng	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg
c	Jumlah pertahun anggota masyarakat yang mendapat penghargaan sebagai inovator lokal	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	4 orang

Kemampuan Balitbang dan Organisasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program kelitbangan dalam rangka optimalisasi pembangunan daerah dan peningkatan daya saing daerah, memiliki keterbatasan baik dibidang anggaran maupun sumberdaya manusia. Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan kelitbangan dilaksanakan melalui tiga strategi, yaitu: swakelola, kerjasama operasional dan kolaborasi.

- 1) Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi secara mandiri oleh kementerian/lembaga/dinas/instansi sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain (IPL) dan/atau kelompok masyarakat (Pokmas).
- 2) Kerjasama operasional (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melaksanakan suatu kegiatan dan usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dengan menanggung keuntungan dan kerugian secara bersama.
- 3) Kolaborasi merupakan kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk melaksanakan kegiatan kelitbangan, yang didasari dengan prinsip-prinsip kebersamaan, kerjasama, berbagi tugas, kesetaraan dan tanggungjawab, dengan tujuan memperoleh hasil-hasil inovatif, terobosan, dan/atau istimewa/luar biasa, serta prestasi kolektif yang memuaskan.

Selanjutnya dalam melaksanakan evaluasi faktor penting yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan, dan organisasi pemerintah daerah sebagai penanggungjawab pelaksana adalah :

1. Capaian atau luaran dari setiap program kelitbangan yang dilaksanakan harus dapat direalisasikan dalam rangka menjawab isu strategis yang dijawab melalui kegiatan kelitbangan.
2. Hasil kelitbangan dapat dimanfaatkan dalam rangka membantu tugas-tugas OPD guna meningkatkan kemampuan mewujudkan peningkatan kualitas layanan publik dan daya saing daerah.
3. Dapat melaksanakan evaluasi secara mandiri terkait dengan kemanfaatan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program kelitbangan.

Form pelaporan realisasi Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 – 2025 dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut ini.

Tabel 4.2. Format Pelaporan Realisasi Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Buleleng

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN* (Rp. 000)	PENANGGU NGJAWAB	CAPAIAN KELUARAN	KENDALA	TANTANGAN	PENERIMA MANFAAT	KET.
A	SWAKELOLA							
1	Pengembangan/Penambahan Fitur Aplikasi Daftar hadir online Kabupaten Buleleng	440.000	BKPSDM	Tersedianya Aplikasi Daftar hadir online Kabupaten Buleleng				
2	Pengembangan/Penambahan Fitur Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai Kabupaten Buleleng	440.000	BKPSDM	Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai Kabupaten Buleleng				
3	Reviu Laporan Keuangan	503.640	Inspektorat	Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja pemerintah				
4	Evaluasi Lakip SKPD dan Reviu Lakipda	65.010	Inspektorat	Persentase SKPD yang telah ditetapkan ZI menuju WBK/WBBM				
5	Penilaian Zona Integritas	54.090	Inspektorat	Persentase SKPD yang telah ditetapkan ZI menuju WBK/WBBM				
6	Bimbingan Teknis SPIP, Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Penyelenggaraan SPIP, Monitoring dan Evaluasi SPIP, laporan	86.580	Inspektorat	Meningkatnya Level Maturitas SPIP, Persentase SKPD dengan maturitas SPIP minimal level 3				
7	Kajian pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi publik	580.000	Dinas Kominfo sandi	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik				
8	kajian DED Interior Kantor Diskominfosanti dan BCC	75.000	Dinas Kominfo sandi	Memiliki dokumen Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor				
9	Kajian pengembangan Inovasi Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	160.037	Disdukcapil	Jumlah jenis inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang telah dilaksanakan				
10	Indek Literasi Masyarakat	1.000.000	DAPD	Tersedianya data indek literasi masyarakat				
11	Pengembangan Perpustakaan Desa	800.000	DAPD	Terbentuknya/Berkembangnya perpustakaan desa				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN* (Rp. 000)	PENANGGU NGJAWAB	CAPAIAN KELUARAN	KENDALA	TANTANGAN	PENERIMA MANFAAT	KET.
12	Pengembangan perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	500.000	DAPD	Jumlah Kelompok masyarakat yang menerapkan perpustakaan berbasis inklusi sosial				
13	Pendataan dan pemetaan daerah rawan kebakaran	100.000	Dinas Pemadam Kebakaran	terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Kebakaran sesuai dengan kajian resiko bahaya kebakaran				
14	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	1.660.000	Dinas Pemadam Kebakaran	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Pelayanan Publik				
15	Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Inisiatif DPRD	750.000	Sekretariat DPRD	Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD				
16	Program Penegasan Batas Daerah	1.143.768	Bagian Pemerintahan Setda Buleleng	Terwujudnya tertib administrasi Pemerintahan melalui kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas daerah				
17	Penelitian Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	825.000	Dinas Kesehatan	Dokumen Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan				
18	Kajian Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) untuk penanganan PMKS.	240.000	Dinas Sosial	Memiliki Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) untuk penanganan PMKS.				
19	Kajian Ranperda TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di Kabupaten Buleleng	30.000	DP2KBP3A Kabupaten Buleleng	Persentase Lembaga penyedia layanan bagi Perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk P2TP2A yang sesuai dengan standar				
20	Kajian Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Buleleng	50.000	DP2KBP3A Kabupaten Buleleng	Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak				
21	Kajian kuantitas dan kualitas penduduk Kabupaten Buleleng	250.000	DP2KBP3A Kabupaten Buleleng	Meningkatnya Pembinaan kepersertaan KB di wilayah dan sasaran khusus				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN* (Rp. 000)	PENANGGU NGJAWAB	CAPAIAN KELUARAN	KENDALA	TANTANGAN	PENERIMA MANFAAT	KET.
22	Kajian Statistik Gender Kabupaten Buleleng	195.000	DP2KBP3A Kabupaten Buleleng	Meningkatnya kualitas informasi data gender dan anak				
23	Kajian Profil Anak Kabupaten Buleleng	125.000	DP2KBP3A Kabupaten Buleleng	Meningkatnya kualitas informasi data gender dan anak				
24	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	75.231.504	Disbud	Fasilitasi dan Monev Hibah, Jumlah desa Adat yang dibina dan dilestarikan, jumlah pecalang yang dilatih, jumlah sekaa truna yang dibina dan dilestarikan, penyuratan awig-awig desa adat, penyuratan awig-awig sekaa truna				
25	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	888.250	Disbud	Jumlah Subak Abian yang dibina dan dilestarikan, Jumlah Subak yang dibina dan dilestarikan penyuratan awig-awig Subak, penyuratan awig-awig Subak Abian				
26	Register Cagar Budaya Yang Direkomendasi	480.550	Disbud	Jumlah Cagar Budaya Yang Direkomendasi				
27	Register Cagar Budaya yang akan didaftarkan di Database	308.531	Disbud	Jumlah Obyek yang diduga Cagar Budaya yang akan didaftarkan di Database				
28	Monitoring dan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2.697.699	Dinas PMD	Terbentuk dan berkembangnya kawasan baru.				
29	Pengkajian Pemekaran Banjar Dinas	249.999	Dinas PMD	Terwujudnya banjar dinas definitif				
30	Pengembangan Perbenihan & Perlindungan Hortikultura	500.000	Distan	Jumlah demplot komoditi hortikultura				
31	Pengembangan benih unggul perkebunan	2.860.000	Distan	Jumlah benih unggul perkebunan				
32	Pelestarian SDG Hewan	500.000	Distan	Jumlah pelestarian SDG Hewan				
33	Kajian Pengembangan Kawasan Desa Pariwisata	500.000	Kec.Seririt	Jumlah yang mengembangkan Kawasan Desa Pariwisata				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN* (Rp. 000)	PENANGGU NGJAWAB	CAPAIAN KELUARAN	KENDALA	TANTANGAN	PENERIMA MANFAAT	KET.
34	Pengembangan Agro Wisata di Wilayah Kecamatan Busungbiu	1.200.000	Kecamatan Busungbiu	Jumlah Desa yang berkembang agro wisatanya				
35	Penyusunan Kajian pengembangan wisata heritage perkotaan singaraja	50.000	Dinas Pariwisata	Jumlah kajian pengembangan wisata heritage perkotaan singaraja				
36	Penyusunan Kajian analisa pasar pariwisata Kabupaten Buleleng	180.280	Dinas Pariwisata	Jumlah kajian analisa pasar pariwisata Kabupaten Buleleng				
37	Kajian Teknis Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten	70.000	Disdagprinko pUKM	Berkembangnya produk unggulan daerah				
38	Pengembangan Buleleng Directoy Bisnis	10.000	Disdagprinko pUKM	Berkembangnya produk unggulan daerah.				
39	Percontohan Budidaya Air Tawar	280.203	DKPP	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
40	Pengembangan Saprass Perikanan Tangkap	535.497	DKPP	Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				
41	Pekarangan Pangan Lestari	730.000	DKPP	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				
42	Gelar Pangan Lokal	75.000	DKPP	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				
43	Peningkatan produksi pangan lokal	500.000	Kec.Seririt	Meningkatkan produksi pangan lokal				
44	Penerapan Teknologi Pengolahan Garam Viramide	49.000	Kecamatan Gerokgak	Pengolahan Garam Viramide di Wilayah Kecamatan				
45	Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN)	75.000	DKPP	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN* (Rp. 000)	PENANGGU NGJAWAB	CAPAIAN KELUARAN	KENDALA	TANTANGAN	PENERIMA MANFAAT	KET.
46	Optimalisasi potensi kelautan dan perikanan	35.000	DKPP	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
47	Optimalisasi potensi kelautan dan perikanan	500.000	Kec.Seririt	Jumlah Desa yang mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan				
48	Penyusunan sistem informasi penanaman modal	1.500.000	DPMPTSP	Jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun dan di upgrade				
49	Kajian kebijakan penanaman modal	1.030.000	DPMPTSP	Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah				
50	Monitoring evaluasi dan pelaporan	630.000	DPMPTSP	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi LKPM yang disusun				
51	Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	530.000	DPMPTSP	Jumlah pengusaha yang paham dengan laporan kegiatan penanaman modal(LKPM)				
52	Penyusunan perencanaan penanaman modal	1.090.000	DPMPTSP	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun				
53	Penyelesaian permasalahan penanaman modal	370.162	DPMPTSP	Jumlah kasus yang difasilitasi				
54	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	1.211.014	DPMPTSP	Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi				
55	Penyusunan profil investasi	69.324	DPMPTSP	Jumlah dokumen profil investasi yang disusun				
56	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A I,II pada Sector Pekerjaan Umum,Perhubungan Komunikasi dan Informatika,serta Ijin Lokasi ,Ijin Prinsip,HO/SITU	2.510.000	DPMPTSP	Jumlah permohonan izin sektor Pekerjaan Umum,Perhubungan Komunikasi dan Informatika,serta Ijin Lokasi IMB,Ijin Prinsip,HO/SITU yang				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN* (Rp. 000)	PENANGGU NGJAWAB	CAPAIAN KELUARAN	KENDALA	TANTANGAN	PENERIMA MANFAAT	KET.
				ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan				
57	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A III pada Sector Pertanian,Perikanan,dan Ijin IUJK,Reklama	1.222.972	DPMPTSP	Jumlah permohonan izin sektor Pertanian,Perikanan,dan Ijin IUJK,Reklama yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan				
58	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I,II pada Sector Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan	1.960.000	DPMPTSP	Jumlah permohonan izin sektor Perindustrian,Perdagangan dan Pendidikan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan				
59	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B III pada Sector Pariwisata dan Kesehatan	1.212.972	DPMPTSP	Jumlah permohonan izin sektor Pariwisata dan Kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan				
60	Inspeksi Kondisi Jalan	1.107.295	DPUTR	Tersedianya Database kondisi Jalan				
61	Kegiatan Perencanaan Pembangunan, Peningkatan, Operasi, dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	1.257.320	DPUTR	Tersedianya perencanaan pengelolaan Sumber Daya Air				
62	Kegiatan Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum	2.531.363	DPUTR	Tersedianya perencanaan SPAM				
63	Pendampingan Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum	173.066	DPUTR	Tersedianya Perencanaan Pembangunan Gedung Negara				
64	Penyusunan Regulasi Pemanfaatan tata ruang	5.250.401	DPUTR	Meningkatnya Regulasi Pemanfaatan Ruang				
65	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	3.248.401	DPUTR	Tersusunnya Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN* (Rp. 000)	PENANGGU NGJAWAB	CAPAIAN KELUARAN	KENDALA	TANTANGAN	PENERIMA MANFAAT	KET.
66	Revisi rencana tata ruang	2.002.000	DPUTR	Terkoreksinya Rencana Tata Ruang				
67	Legalisasi naskah adakademis ranperda	75.000	Disperkimta	Terlegalisasinya Ranperda RP3KP				
68	Tatanan Transportasi Lokal Kabupaten Buleleng	350.000	Dishub	Peningkatan Kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik.				
69	Kajian Trayek Angkutan Perkotaan Kabupaten Buleleng	100.000	Dishub	Peningkatan Kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik.				
70	Transportasi Dalam Angka Kabupaten Buleleng	350.000	Dishub	Peningkatan Kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik.				
71	Kajian Trayek Angkutan Perdesaan Kabupaten Buleleng	100.000	Dishub	Peningkatan Kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik.				
72	Master Plan Pengembangan Intelligent Transport System (ITS) di Kabupaten Buleleng	350.000	Dishub	Peningkatan Kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik.				
73	Kajian jaringan lintas angkutan barang Kabupaten Buleleng	100.000	Dishub	Peningkatan Kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik.				
74	Rencana Induk jaringan Transportasi jalan Kab. Buleleng	350.000	Dishub	Peningkatan Kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik.				
75	DED Pembangunan Area Traffic Control System di Kabupaten Buleleng	100.000	Dishub	Peningkatan Kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik.				
76	Jasa konsultasi penelitian pengukuran kualitas air, udara ambien dan tanah	500.000	DLH	Jumlah Data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas air, udara dan Tanah tersedia				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN* (Rp. 000)	PENANGGU NGJAWAB	CAPAIAN KELUARAN	KENDALA	TANTANGAN	PENERIMA MANFAAT	KET.
77	Jasa konsultasi penentuan kelas air di Tukad Buleleng	500.000	DLH	Jumlah dokumen penentuan kelas air				
78	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten Buleleng	100.000	DLH	Jumlah dokumen Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten Buleleng				
79	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100.000	DLH	Jumlah dokumen penetapan pengelolaan keanekaragaman hayati				
80	Kajian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	200.000	DLH	Luas RTH Kawasan Perkotaan yang ditata dan dipelihara dalam kondisi baik				
81	Fasilitasi Pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi	80.260	Balitbang	Tersusunnya dokumen fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi				
82	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	50.000	Balitbang	Tersusunnya dokumen Penyusunan Naskah Akademik Perubahan Perda No 3 Tahun 2008				
83	Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	62.376	Balitbang	Tersusunnya dokumen fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi				
84	Fasilitasi, Pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur desa	90.000	Balitbang	Tersusunnya dokumen fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur desa				
85	Sub Kegiatan : Fasilitasi, Pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan	95.000	Balitbang	Tersusunnya dokumen fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan				
86	Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat	68.613	Balitbang	Tersusunnya dokumen fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang ketertiban dan ketentraman umum				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN* (Rp. 000)	PENANGGU NGJAWAB	CAPAIAN KELUARAN	KENDALA	TANTANGAN	PENERIMA MANFAAT	KET.
				dan perlindungan masyarakat				
87	Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK)	140.000	Balitbang	Tersusunnya RINDUK dan Evaluasi				
88	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	90.000	Balitbang	Tersusunnya dokumen penelitian dan pengembangan bidang kesehatan				
89	Penelitian dan Pengembangan aspek aspek sosial	95.000	Balitbang	Tersusunnya dokumen penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial				
90	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	90.000	Balitbang	Tersusunnya dokumen penelitian dan pengembangan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
91	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi masyarakat	90.000	Balitbang	Tersusunnya dokumen penelitian dan pengembangan bidang partisipasi Masyarakat				
92	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	86.664	Balitbang	Tersusunnya dokumen Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				
93	Penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	88.000	Balitbang	Tersusunnya dokumen penelitian dan pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan				
94	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	95.000	Balitbang	Tersusunnya dokumen penelitian dan pengembangan bidang kepemudaan dan olahraga				
95	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	64.032	Balitbang	Tersusunnya Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
96	Penelitian dan Pengembangan tenaga kerja	88.000	Balitbang	Dokumen penelitian dan Pengembangan tenaga kerja				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN* (Rp. 000)	PENANGGU NGJAWAB	CAPAIAN KELUARAN	KENDALA	TANTANGAN	PENERIMA MANFAAT	KET.
97	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	143.232	Balitbang	Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
98	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	150.553	Balitbang	Laporan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				
99	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	70.000	Balitbang	Laporan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				
100	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	140.000	Balitbang	Laporan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				
101	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	142.128	Balitbang	Laporan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				
102	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	70.000	Balitbang	Laporan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				
103	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	140.000	Balitbang	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan Pekerjaan Umum				
104	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	72.680	Balitbang	terlaksananya penelitian dan pengembangan perhubungan				
105	Inovasi dan Pengembangan Teknologi	1.750.000	Balitbang	Tersusunnya dokumen penelitian inovasi dan teknologi				
106	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	123.157	Balitbang	Jumlah Dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				
107	Fasilitasi Inovasi Kepala Daerah	580.000	Balitbang	Inovasi Kepala Daerah				
108	Fasilitasi Inovasi SKPD	455.000	Balitbang	Inovasi SKPD				
109	Fasilitasi Inovasi Komunitas/Kelompok	300.000	Balitbang	Inovasi Komunitas/Kelompok				
110	Fasilitasi Inovasi Masyarakat	300.000	Balitbang	Inovasi Masyarakat				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN* (Rp. 000)	PENANGGU NGJAWAB	CAPAIAN KELUARAN	KENDALA	TANTANGAN	PENERIMA MANFAAT	KET.
111	Penyusunan kajian Pengembangan Teknologi	300.000	Balitbang	Kajian Pengembangan Teknologi				
112	Naskah Akademis Revisi RTRW Kabupaten Buleleng	50.000	Balitbang	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				
113	Naskah Akademis RDTR Kawasan Perkotaan Celukan Bawang	50.000	Balitbang	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				
114	Naskah Akademis RDTR Kawasan Perkotaan Gerokgak	50.000	Balitbang	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				
115	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan :	70.000	Balitbang	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				
116	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.000	Balitbang	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				
117	Naskah Akademis Pengelolaan Air Limbah	50.000	Balitbang	Memiliki dokumen Naskah Akademis Pengelolaan Air Limbah				
118	Penyusunan Kajian Pemetaan Data Base Rawan Bencana Kabupaten Buleleng	80.000	Balitbang	Tersusunnya dokumen fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat				
119	Pengkajian terhadap pemetaan data base Daerah Rawan Konflik Kabupaten Buleleng	62.376	Balitbang	Jumlah dokumen/buku Pengkajian terhadap pemetaan data base Daerah Rawan Konflik Kabupaten Buleleng				
120	Kajian Profil Kemiskinan Daerah Kabupaten Buleleng	100.000	Balitbang					
121	Fasilitasi penerapan inovasi	119.784	Balitbang	Inovasi SKPD dan masyarakat				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN* (Rp. 000)	PENANGGU NGJAWAB	CAPAIAN KELUARAN	KENDALA	TANTANGAN	PENERIMA MANFAAT	KET.
122	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	26.434	Balitbang	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				
123	Pengembangan Basis Data Kependudukan di Kecamatan Buleleng	40.800	Kecamatan Buleleng	Terselenggaranya pelayanan masyarakat yang optimal				
124	Pengembangan Program Layanan Lelang dan Pengelolaan Dokumen Pengadaan	30.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tercapainya sistem pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kondisi dan perkembangan terbaru yang dapat dimanfaatkan pelaku pengadaan barang dan jasa				
125	Pengembangan layanan kecamatan berbasis online	70.000	Kecamatan Sukasada	Terealisasi pelayanan kecamatan Sukasada yang efisien dan terkomputerisasi				
126	Pengembangan E-Office Kecamatan Sukasada	55.000	Kecamatan Sukasada	Terealisasinya Sistem Informasi Kecamatan Sukasada yang efisien dan terkomputerisasi				
127	Kaji terap budidaya nila sistem minapadi	50.000	DKPP	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				
128	Kaji Terap pembenihan Nila	50.000	DKPP					
129	Pelatihan pendederan nila	50.000	DKPP					
130	Penyiapan dan penyebaran informasi teknologi perikanan	50.000	DKPP					
131	Pelatihan Pangan Lokal Non Beras	75.000	DKPP	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis SumberDaya Lokal				
132	Evaluasi PERDA Retribusi Perijinan Perikanan	50.000	DKPP	memiliki dokumen hasil evaluasi terhadap retribusi perijinan perikanan				
133	Diseminasi hasil kelitbangan	300.000	Balitbang	Tersosialisasinya hasil kelitbangan				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN* (Rp. 000)	PENANGGU NGJAWAB	CAPAIAN KELUARAN	KENDALA	TANTANGAN	PENERIMA MANFAAT	KET.
134	Menyusun Profil Inovasi Daerah	24.280	Balitbang	buku profil calon penerima anugrah iptek;				
135	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	300.000	Balitbang	Terwujudnya Hak Kekayaan Intelektual				
136	Menyusun Laporan IDSD	77.120	Balitbang	Laporan IDSD				
137	Menyusun Laporan IGA	77.120	Balitbang	Laporan IGA				
138	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	70.000	Balitbang	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan Komunikasi dan Informatika				
139	Kajian Peta Rencana dan Arsitektur Pengembangan SPBE Kabupaten Buleleng Tahun 2021 - 2025	350.000	Dinas Kominfo sandi	Memiliki sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				
140	Kajian sistem informasi dan integrasi sistem	155.000	Dinas Kominfo sandi	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik				
141	Pengkajian Sarana prasarana Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)	300.000	DAPD	Jumlah Sarana prasarana pendukung SIKD (Server beserta kelengkapannya)				
142	Kajian Akademis inovasi Bank Data Arsip Statis (BADAS)	150.000	DAPD	Dokumen Bank Data Arsip Statis (BADAS)				
B	KERJASAMA PIHAK KETIGA							
1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1.722.738	Inspektorat, BPKP Perwakilan Provinsi Bali,	Meningaktnya Kompetensi SDM Aparatur Pengawasan, Level Kapabilias APIP Kabupaten				2018-2022
2	Pengendalian dan distribusi perekonomian	250.000	Bagian Ekbang	Terkoordinasinya Tim Pengendalian Inflasi Derah (TPID)				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN* (Rp. 000)	PENANGGU NGJAWAB	CAPAIAN KELUARAN	KENDALA	TANTANGAN	PENERIMA MANFAAT	KET.
3	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	250.000	Bagian Ekbang	Tersusunnya Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Buleleng				
4	Pengembangan benih unggul tanaman pangan	800.000	Distan, Batan	jumlah benih unggul tanaman pangan				
C	KOLABORASI							
1	Pengembangan sekolah mercusuar/Lighthouse School Program.	4.661.128	Disdikpora, SMPN 8 Singaraja, PSF	Terwujudnya sekolah model/mercusuar, Output : Tersedianya guru yang berkualitas hasil seleksi, Outcome : Guru berkualitas Manfaat : Terciptanya sekolah model dengan guru yang berkualitas dan sistem manajemen sekolah yang unggul, hasil akhir dicapai tahun 2023				

Keterangan : *Jumlah anggaran periode 2021 – 2025

Sumber data : hasil olah kuesioner dan FGD

BAB V

PENUTUP

Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) Kabupaten Buleleng tahun 2020 – 2025 merupakan dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang memuat arah kebijakan kelitbangan menyangkut strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan oleh seluruh organisasi pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Rinduk Kelitbangan mempunyai tujuan untuk dapat memberikan masukan dalam penyusunan dan melaksanakan perubahan terhadap RPJMD, sehingga mampu mengakomodasi program-program kelitbangan berbasis pada kebutuhan daerah dan masyarakat. Sasaran Rinduk adalah memberikan arah pada pelaksanaan program kelitbangan guna peningkatan kualitas kebijakan daerah berbasis pada kelitbangan.

Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Buleleng tahun 2020-2025 merupakan rencana 5 (lima) tahunan kelitbangan, yang wajib dirumuskan kedalam rencana kerja tahunan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng dan rencana kerja perangkat daerah, sehingga pelaksanaannya dapat direalisasi dengan baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas kinerja kelitbangan.

Rinduk disusun melalui serangkaian proses partisipatif yang melibatkan organisasi perangkat daerah, dimulai dari survey pendahuluan untuk memperoleh informasi dan identifikasi potensi, permasalahan, peluang dan tantangan yang dihadapi lembaga kelitbangan maupun satuan kerja pemerintah daerah dalam menyiapkan hasil kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah Kabupaten Buleleng. Menggali isu-isu pokok dan indikasi program-program prioritas, jejaring kerjasama pemerintah daerah, dan potensi-potensi pengembangan kelitbangan di Kabupaten Buleleng. Dengan demikian diharapkan hasil rumusan RINDUK yang telah ditetapkan menjadi RINDUK Kabupaten Buleleng dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang kelitbangan.

Penguatan terhadap Badan Kelitbangan Kabupaten Buleleng, tidak saja dengan keberadaan RINDUK, tetapi Balitbang Inovda Kabupaten Buleleng telah membentuk kelembagaan kelitbangan meliputi : 1) Majelis Pertimbangan, 2) Tim Pengendali Mutu, 3) Sekretariat TPM, dan 4) Unsur pelaksana serta penunjang pada TIM Kelitbangan (TK), yang dibentuk berdasarkan pada surat keputusan Bupati. Sinergitas dan pelaksanaan koordinasi secara baik diantara perangkat kelitbangan dan dengan dengan pihak-pihak (mitra kerja) harus dilaksanakan secara konsisten, untuk menghasilkan kolaborasi diantara pihak-pihak untuk menghasilkan produk kelitbangan yang berkualitas dan mampu diserap serta dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, yang didukung pemanfaatan ilmu dan teknologi.

Daftar Pustaka

- Aulawi, Dede Farhan, 2020. “Pentingnya Penguatan Inovasi Daerah Dalam Persaingan Global” dalam *Berkarya Beritalima*. <https://beritalima.com/dede-farhan-aulawi-pentingnya-penguatan-inovasi-daerah-dalam-persaingan-global/>.
- Badan Statistik Kabupaten Buleleng, 2020. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buleleng Menurut Pengeluaran 2015-2019.
- Brinkerhoff, Deric W & Benjamin L Crosby. 2002. *Managing Policy Reform: Concepts and Tools for Decision Makers in Developing and Transitioning Countries*. Kumarian Press Ins, Blue Hills Avenue. USA.
- Dewi, Luh Gede Kusuma dan Luh Gede Jayanti Mekar Sari, 2019. “Analisis Kesiapan dan Pengetahuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akutansi Keuangan EMKM”. Dalam *Jurnal Ilmiah Akutansi Vol.4, No. 2, hal 141-160, Desember 2019*.
- Dinas Ketahanan Pangan, 2020. Proposal Pengembangan Sektor Kelautan Dan Perikanan Di Kabupaten Buleleng.
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Tahun 2019.
- Dinas Pariwisata, 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Tahun 2019.
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2019 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Tahun 2019.
- Dinas Statistik Kabupaten Buleleng, 2019. Statistik Pertanian dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Buleleng 2019.
- Dunn, William N, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Terjemahan Samodra Wibawa dkk. Gadjah Mada University. Yogyakarta.
- Frederickson, H.George & Kevin B. Smith. 2003. *The Public Administration Theory Primer*. WestView Press. Oxford.
- Kabupaten Buleleng dalam Angka 2017-2020.
- Kemendagri, 2017. *Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah*, Kemendagri, Jakarta.
- Kemendagri, 2019. *Permendagri 90 tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Program dan Premendagri 70 tahun 2019 tentang SIPD*. Kemendagri, Jakarta.
- Najam, Adil. 1995. “Learning From Literature on Policy Implementation: A Systemic Perspective”. In *Working Paper*. IIASA. Austria.
- Pemda Buleleng, 2013. *Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng (RPJP) Tahun 2005-2025*. Pemda Buleleng.
- Pemda Buleleng, 2017. *Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022*. Pemda Buleleng.